PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT DPRD

HIMPUNAN PROSES PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Padang, Desember 2025

@dprdprovsumbar https://dprd.sumbarprov.go.id/

Jl. S. Parman No.221, Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat

Dipindai dengan CamScanner



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 12 /SB/ 2024

TENTANG

PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023
UNTUK DI TETAPKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 12 /SB/ 2024

TENTANG

PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023
UNTUK DI TETAPKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH

Dipindai dengan CamScanner

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

Padang, 1 Juli 2024

Nomor : 165/ 907 /FPP-DPRD/2024
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Perda.

Kepada Yth:
Sdr. Gubernur Sumatera Barat
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 menjadi Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 Juli 2024, bersama ini kami kirimkan berkas kelengkapan Peraturan Daerah dimaksud, sebagai berikut :

1. Keputusan DPRD.
2. Nota Persetujuan Bersama.
3. Risalah Rapat Paripurna.
4. Laporan Pembahasan Badan Anggaran.
5. Pandangan Umum Fraksi-fraksi
6. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi .

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terimakasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
WAKIL KETUA,

H. IRSYAD SYAFAR, LC, M.Ed

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR :12/SB/2024

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANANAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna tanggal 3 Juni 2024;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah sesuai tahapan dan mekanisme pembahasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomot 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6806);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Dipindai dengan CamScanner

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : 1. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 Tanggal 1 Juli 2024;

2. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 Tanggal 1 Juli 2024.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, yang memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU beserta lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Persetujuan Bersama antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 disepakati oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 1 Juli 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
WAKIL KETUA,

IRSYAD SYAFAR

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DPRD NOMOR : 12/SB/2024

TENTANG PERSETUJUAN DPRD TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
   a. Pendapatan — Rp. 6.263.878.436.851,68
   b. Belanja — Rp. 6.352.991.353.499,87
      Surplus/Defisit — (Rp. 89.112.916.648,19)
   c. Pembiayaan
      1) Penerimaan — Rp. 289.560.461.073,38
      2) Pengeluaran — Rp. 20.000.000.000,00
      3) Pembiayaan Netto — Rp. 269.560.461.073,38
      4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) — Rp. 180.447.544.425,19
2. Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
   a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp. 212.456.553.355,32) dengan rincian sebagai berikut :
      1) Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan — Rp. 6.476.334.990.207,00
      2) Realisasi — Rp. 6.263.878.436.851,68
      Selisih — (Rp. 212.456.553.355,32)
   b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 392.623.329.586,13 dengan rincian sebagai berikut :
      1) Anggaran Belanja Setelah Perubahan — Rp. 6.745.614.683.086,00
      2) Realisasi — Rp. 6.352.991.353.499,87
      Selisih — Rp. 392.623.329.586,13
   c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 180.166.776.230,81 dengan rincian sebagai berikut :
      1) Surplus/Defisit Setelah Perubahan — (Rp. 269.279.692.879,00)
      2) Realisasi — (Rp. 89.112.916.648,19)
      Selisih — Rp. 180.166.776.230,81
   d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 280.768.194,38 dengan rincian sebagai berikut :
      1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan — Rp. 289.279.692.879,00
      2) Realisasi — Rp. 289.560.461.073,38
      Selisih — Rp. 280.768.194,38
   e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
      1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan — Rp. 20.000.000.000,00
      2) Realisasi — Rp. 20.000.000.000,00
      Selisih — Rp. 0,00

Dipindai dengan CamScanner

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 280.768.194,38 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	269.279.692.879,00
2) Realisasi	Rp.	269.560.461.073,38
Selisih	Rp.	280.768.194,38

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	289.279.692.879,38
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Berjalan	Rp.	289.560.461.073,38
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	180.447.544.425,19
d. Koreksi Kesalahan Pembukuaan Tahun Sebelumnya	Rp.	322.477.368,00
e. Lain-Lain	Rp.	41.709.174,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	180.447.544.425,19

4. Laporan Operasional per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan LO	Rp.	6.455.678.341.331,62
b. Beban	Rp.	6.149.856.490.235,09
c. Surplus/Defisit Operasional	Rp.	305.821.851.096,53
d. Surplus/Defisit Non Operasional	Rp.	4.742.756.477,12
e. Pos Luar Biasa	Rp.	0,00
f. Surplus/Defisit LO	Rp.	301.079.094.619,41

5. Neraca dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Asset	Rp.	12.191.738.756.207,30
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	493.355.576.175,90
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	11.698.383.180.031,40

6. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas Daerah per 1 Januari 2023.	Rp.	289.279.692.879,38
b. Arus Kas dari Aktifitas Operasi	Rp.	901.515.422.955,33
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Asset Non keuangan	(Rp.	1.010.628.339.603,52)
d. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.	280.768.194,00
e. Saldo Kas Daerah akhir 31 Desember 2023.	Rp.	180.447.544.425,19

7. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023, sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	11.505.410.775.094,10
b. Surplus/Defisit LO	Rp.	301.079.094.619,41
c. Koreksi Ekuitas	(Rp.	108.106.689.682,09)
d. Ekuitas akhir	Rp.	11.698.383.180.031,40

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

WAKIL KETUA,

IRSYAD SYAFAR

Dipindai dengan CamScanner

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 120-152/GSB-2024
NOMOR : 120/4/2024
TANGGAL 1 JULI 2024

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
   Jabatan : Gubernur Sumatera Barat
   Alamat Kantor : Jl. Sudirman Nomor 51 Padang
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : IRSYAD SYAFAR.
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
   b. Nama : SUWIRPEN SUIB.
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
   c. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tertuang pada lampiran Nota Persetujuan Bersama ini.

Dipindai dengan CamScanner

2. PIHAK KEDUA secara kelembagaan tidak bertanggungjawab terhadap permasalahan administrasi dan kerugian keuangan daerah dari Pelaksanaan Program dan kegiatan yang terdapat dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang pertanggungjawabannya disetujui bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, untuk di evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Nota Persetujuan Bersama ini.

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR
SUMATERA BARAT

MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Wakil Ketua,

IRSYAD SYAFAR
Wakil Ketua

SUWIRPEN SUIB
Wakil Ketua,

INDRA DT. RAJOLELO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : NOTA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
   a. Pendapatan — Rp. 6.263.878.436.851,68
   b. Belanja — Rp. 6.352.991.353.499,87
      Surplus/defisit — (Rp. 89.112.916.648,19)
   c. Pembiayaan
      1) Penerimaan — Rp. 289.560.461.073,38
      2) Pengeluaran — Rp. 20.000.000.000,00
      3) Pembiayaan Netto — Rp. 269.560.461.073,38
      4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) — Rp. 180.447.544.425,19
2. Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
   a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp. 212.456.553.355,32) dengan rincian sebagai berikut :
      1) Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan — Rp. 6.476.334.990.207,00
      2) Realisasi — Rp. 6.263.878.436.851,68
      Selisih — (Rp. 212.456.553.355,32)
   b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 392.623.329.586,13 dengan rincian sebagai berikut :
      1) Anggaran Belanja Setelah Perubahan — Rp. 6.745.614.683.086,00
      2) Realisasi — Rp. 6.352.991.353.499,87
      Selisih — Rp. 392.623.329.586,13
   c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 180.166.776.230,81 dengan rincian sebagai berikut :
      1) Surplus/defisit Setelah Perubahan — (Rp. 269.279.692.879,00)
      2) Realisasi — (Rp. 89.112.916.648,19)
      Selisih — Rp. 180.166.776.230,81
   d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 280.768.194,38 dengan rincian sebagai berikut :
      1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan — Rp. 289.279.692.879,00
      2) Realisasi — Rp. 289.560.461.073,38
      Selisih — Rp. 280.768.194,38
   e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
      1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan — Rp. 20.000.000.000,00
      2) Realisasi — Rp. 20.000.000.000,00
      Selisih — Rp. 0,00
   f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 280.768.194,38 dengan rincian sebagai berikut :
      1) Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan — Rp. 269.279.692.879,00
      2) Realisasi — Rp. 269.560.461.073,38
      Selisih — Rp. 280.768.194,38

Dipindai dengan CamScanner

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	289.279.692.879,38
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Berjalan	Rp.	289.560.461.073,38
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	180.447.544.425,19
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	322.477.368,00
e. Lain-Lain	Rp.	41.709.174,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	180.447.544.425,19

4. Laporan Operasional per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan LO	Rp. 6.455.678.341.331,62
b. Beban	Rp. 6.149.856.490.235,09
c. Surplus/defisit Operasional	Rp. 305.821.851.096,53
d. Surplus/Defisit Non Operasional	Rp. 4.742.756.477,12
e. Pos Luar Biasa	Rp. 0,00
f. Surplus/Defisit LO	Rp. 301.079.094.619,41

5. Neraca dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Asset	Rp.12.191.738.756.207,30
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 493.355.576.175,90
c. Jumlah Ekuitas	Rp.11.698.383.180.031,40

6. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas Daerah per 1 Januari 2023.	Rp.	289.279.692.879,38
b. Arus Kas dari Aktifitas Operasi	Rp.	901.515.422.955,33
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Asset Non keuangan	(Rp.	1.010.628.339.603,52)
d. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.	280.768.194,00
e. Saldo Kas Daerah Akhir 31 Desember 2023.	Rp.	180.447.544.425,19

7. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023, sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp.11.505.410.775.094,10
b. Surplus/Defisit LO	Rp. 301.079.094.619,41
c. Koreksi Ekuitas	(Rp. 108.106.689.682,09)
d. Ekuitas akhir	Rp 11.698.383.180.031,40

GUBERNUR
SUMATERA BARAT

MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Wakil Ketua,

IRSYAD SYAFAR
Wakil Ketua

SUWIRPEN SUIB
Wakil Ketua,

INDRA DT. RAJOLELO

Dipindai dengan CamScanner

RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Hari/Tanggal	:	Senin / 1 Juli 2024
Pukul	:	14.00 Wib
Tempat	:	Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sumatera Barat
Acara	:	1. Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Usul Prakarsa Ranperda tentang Pelayanan Mutu Kesehatan
Pimpinan Rapat	:	H. Irsyad Syafar, Lc, M.Ed
Pimpinan DPRD	:	H. Indra Dt. Rajolelo, SH, MM H. Suwirpen Suib, S.Sos
Notulis	:	Nasrizal Rivai, SE, M.Si
Jumlah Anggota	:	65 Anggota DPRD orang terdiri dari :
1. Fraksi Partai Gerindra	:	14 Orang
2. Fraksi PKS	:	10 Orang
3. Fraksi Partai Demokrat	:	10 Orang
4. Fraksi PAN	:	10 Orang
5. Fraksi Partai Golkar	:	8 Orang
6. Fraksi PPP- NasDem	:	7 Orang
7. Fraksi PDI-P dan PKB	:	6 Orang
Hadir	:	Anggota DPRD yang hadir terdiri dari :

1. H. Hidayat, SS, MH
2. Ismunandi Syofyan, SE
3. H. Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo, S.Pt
4. Drs. H. Syafruddin Putra Dt. Sunggono, M.Si
5. Hj. Yunisra Syahiran, S.Pd
6. Desrio Putra, ST
7. Mesra
8. Evi Yandri Rajo Budiman
9. Drs. Nurfirman Wansyah, MM, Apt
10. H. Mochklasin, S.Si
11. H. Muhammad Ridwan, S.IP
12. H. Gustami Hidayat, S.Pt, MP
13. Budiman Dt. Malano Garang, S.Ag, MM
14. Rafdinal, SH
15. Ali Tanjung, SH
16. Hj. Aida, SH
17. Jefri Masrul, SE
18. H. M. Nurnas, ST
19. Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano, MM, MBA
20. H. Ismet Amzis, SH
21. Hj. Ermaneli
22. H. Maigus Nasir, S.Pd
23. Daswanto, SE
24. H. Dody Delvi, SE
25. H. Muzli M. Nur, S.Pd
26. Hj. Artati, SH, MH
27. Muhammad Ikhbal, SE
28. H. Bukhari Dt. Tuo, SE
29. Zulkenedi Said, S.Sos, SH, M.Si, MM
30. Afrizal, SH, MH

Dipindai dengan CamScanner

31. DR. Hardinalis Kobal, SE, MM
32. Zarfi Deson, SH
33. Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz
34. Ir. H. Hendra Irwan Rahim, MM
35. Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz
36. drh. Nela Abdika Zamri
37. Sawal Dt. Putih, SH
38. H. Daswipetra Dt. Manjinjiang Alam
39. H. Taufik Syahrial
40. H. Daswipetra Dt. Manjinjiang Alam, SE, M.Si
41. Bakri Bakar, SH
42. Albert Hendra Lukman, SE
43. Leli Arni, S.Pd, M.Si

Eksekutif : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
Asisten III Setda Provinsi Sumatera Barat
Bappeda
Inspektorat
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang
Dinas Perkimtan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Dinas PMD
Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB
Dinas Pangan
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Pendidikan
Dinas Satpol PP
Dinas Kehutanan
Dinas Perhubungan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Kesehatan
Dinas Koperasi dan UKM
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Dinas Dinas ESDM
Dinas Sosial
Dinas Kominfo dan Statistik
Dinas Kebudayaan
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Dinas Pariwisata
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Badan Penelitian dan Pengembangan
Badan Pendapatan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPBD
BPSDM
Biro Perekonomian Setda. Provinsi Sumbar
Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar
Biro Organisasi Setda Provinsi Sumbar
Biro Kesra Setda Provinsi Sumbar
Biro Adpem Setda Provinsi Sumbar
Biro Umum Setda Provinsi Sumbar
RSJ. Prof. Dr. HB. Saanin
RSUD Pariaman

Turut Hadir : A. Wartawan Media Cetak dan Elektronik
B. Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar

Dipindai dengan CamScanner

JALANNYA RAPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD, DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. TENAGA AHLI DPRD, REKAN-REKAN WARTAWAN DAN UNDANGAN BESERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, siang hari ini kita dapat melaksanakan kembali pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pengambinan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD, undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi siang hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, Senin tanggal 1 Juli 2024 dengan acara " Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

.....(Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan Tata Tertib, Rapat Paripurna untuk penetapan Ranperda dan APBD, dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah memenuhi kuorum, maka Rapat Paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sesuai dengan amanat Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, pada rapat paripurna tanggal 3 Juni 2024 yang lalu, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, untuk selanjutnya di bahas dan disepakati bersama dengan DPRD.

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasannya mulai dari pembahasan pendahuluan oleh Komisi Bersama OPD dan dilanjutkan dengan pembahasan dan finalisasi oleh Badan Anggaran Bersama TAPD.

Berhubung Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan sarana evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD, maka pembahasan tidak hanya menyangkut pada aspek realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah atau SILPA, akan tetapi juga mencakup aspek efektivitas, efisien, akuntabilitas serta capaian target kinerja program dan kegiatan yang dicapai.

Dipindai dengan CamScanner

Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran Bersama TAPD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, secara umum dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2023, belum maksimal. Kondisi ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan terutama PAD yang menjadi indicator kinerja utama hanya sebesar Rp. 2.784.774.801.212,- atau 91.77 %. Realisasi ini lebih rendah dari Tahun 2022. Demikian juga dengan belanja, realisasinya hanya sebesar 94.72 % dan terdapat 55 kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp. 9.125.999.209,-.
2. Rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kelemahan dalam aspek perencanaan baik perencanaan pendapatan maupun perencanaan belanja dalam bentuk program dan kegiatan, kelamahan dalam proses pelaksanaan serta pengawasan. Permasalahan tersebut, pada umumnya merupakan permasalahan yang terus berulang dari tahun ke tahun dan tidak ada evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki kelemahan tersebut.
3. Hasil pembahasa terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 serta rekomendasi dan catatan yang diberikan oleh DPRD sebagaimana termuat nanti dalam laporan hasil pembahasan, hendaknya menjadi bahan evaluasi dan bahan penyempurnaan oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2024 dan APBD Tahun 2025.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sebelum hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 dilanjutkan pada tahap pembicaraan Tingkat kedua dalam Rapat Paripurna ini, diakhir pembahasan pembicaraan tingkta pertama, terlebih dahulu Fraski-Fraksi menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya.

Dari pendapat akhir Fraksi-Fraksi tersebut, semua Fraksi dapat menyetujui hasil pembahasan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna dan disamping itu, Fraksi-Fraksi juga memberikan catatan dan masukan yang perlu menjadi perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah, agar kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih baik.

Sesuai dengan agenda pada tahap pembicaraan tingkat kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pada rapat paripurna ini, Badan Anggaran akan menyampaikan Laporan hasil pembahasannya terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan dan Penetapan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Sesuai dengan urutan kegiatan tersebut, kita minta kepada Sdr. Sekretaris DPRD selaku Sekretaris Badan Anggaran untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

.....

Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023

.....

Terima kasih kami sampaikan Sekretaris DPRD yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota Dewan, apakah dapat menyetujui hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 ?

..... (ketokan palu 1 x)

Dipindai dengan CamScanner

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah memberikan persetujuannya terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD.

Sesuai dengan maksud Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan konsep Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD tersebut.

.....

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Kesepakatan
Bersama tentang Ranperda PPA Tahun 2023

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan Kesepakatan Bersama tentang Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Selanjutnya kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD tentang Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, untuk ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD ?
..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap konsep Keputusan DPRD untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Penandatanganan Persetujuan Bersama terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Pada kesempatan ini, dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud diberikan Nomor : 12/SB/2024 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 untuk dtetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkannya Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, maka acara kita lanjutkan dengan penandatangan Kesepakatan Bersama Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD, kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan.

.....

Penandatanganan Kesepakatan Bersama Ranperda
Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023

.....

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditanda tanganinya Nota Persetujuan Bersama oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD, maka sesuai dengan agenda pada rapat paripurna ini, acara dilanjutkan dengan Penyampaian Pendapat Akhir/ Sambutan Gubernur Sumatera Barat.

Dipindai dengan CamScanner

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....

Penyampaian Pendapat Akhir/Sambutan Gubernur, (diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat).

Pertama dan utama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufik, Hidayah Serta Inayah-nya. sehingga kita masih diberi kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara serta masyarakat.

Shalawat beserta salam kita peruntukkan bagi nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada umatnya untuk kebahagiaan didunia dan akhirat.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat,

Mengawali sambutan ini ijinkan kami atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD beserta seluruh Anggota DPRD, yang telah bersungguh-sungguh untuk membahas, memusyawarahkan dan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada badan anggaran dprd dan tim anggaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras sampai akhirnya rancangan peraturan daerah ini bisa disepakati bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Peraturan Daerah ini merupakan amanah dari pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta Ikhtisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. dan selanjutnya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

Oleh karena itu kami yakin dan percaya bahwa dari hasil pembahasan dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat, terdapat saran, kritikan dan masukan yang konstruktif terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2023. hal ini tentunya akan kami jadikan sebagai pedoman untuk perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dimasa yang akan datang.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat,

Setelah melewati tahapan persidangan dan serangkaian pembahasan secara mendalam terhadap segala aspek yang relevan terhadap ranperda ini, maka pada hari ini kita telah sampai pada tahap penetapan keputusan dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Hal ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD mempunyai pemikiran yang sama untuk bagaimana pengelolaan keuangan dimasa-masa yang akan datang bisa lebih baik dan bisa memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat disegala aspek kehidupan.

Dipindai dengan CamScanner

Kami yakin dan percaya dengan kebersamaan antara eksekutif dan legislatif maka akan lebih banyak lagi hal yang dapat kita laksanakan untuk kesejahteraan masyarakat sumatera barat sebagaimana yang telah kita tuangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021–2026 yaitu terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat,

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tahap berikutnya yang Pemerintah Daerah akan segera menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Mudah-mudahan dalam tahap terakhir ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami kendala yang berarti, sehingga kitapun dapat melaksanakan tugas lain yaitu membahas RAPBD Tahun 2025 dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Akhirnya kehadirat Allah SWT kita berdo'a, semoga melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua serta memberikan kekuatan lahir bathin dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Sambutan/Pendapat Akhirnya terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dalam Pasal 195 ayat (1) ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ditegaskan, bahwa Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD, disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati kepada Menteri Dalam Negeri, untuk dievaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memenuhi batasan waktu penyampaiannya kepada Menteri Dalam Negeri, agar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dapat segera dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan, bahwa masa jabatan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tanggal 28 Agustus 2024. Sesuai dengan agenda pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024, dilakukan paling lambat Minggu ke 2 (dua) bulan Agustus 2024.

Agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembahasan dan penetapannya, maka diminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mempercepat penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 kepada DPRD, agar dapat segera di bahas dan disepakati bersama.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;
Dengan telah ditetapkannya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Dipindai dengan CamScanner

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, kami menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin dan undangan semua, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini, terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbilalamin, Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 pada hari ini, secara resmi kami tutup.
..... (ketukan palu 3x)

Terima kasih,
Billahitaufiqwalhidayah
Wassalamualaikum Wr.Wb

Rapat ditutup pukul 16.10 Wib

Padang, 1 Juli 2024

Pimpinan Rapat,	Sekretaris DPRD,	Pembuat Risalah,
H. IRSYAD SAFAR, LC, M.Ed	**H. RAFLIS, SH, MM**	**NASRIZAL RIVAI, SE, M.Si**

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023
DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
SENIN, 1 JULI 2024

ASSALAM'MUALAIKUM WR.WB

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN, UNDANGAN DAN HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN

Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, siang Hari ini kita dapat hadir bersama-sama pada Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Shalawat beriring salam, kita sampaikan juga kepada junjungan umat, Nabi Besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya di yaumil masyara nanti. Amin YRA.

Sehubungan dengan telah rampungnya pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Anggaran, TAPD dan OPD-OPD dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

   Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPRD, paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran untuk selanjutnya di bahas dan disepakati bersama dengan DPRD, paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Dipindai dengan CamScanner

Sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan akhir dari siklus agenda pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari KUA-PPAS, APBD, Perubahan APBD dan diakhiri dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Sebagai akhir dari siklus pengelolaan keuangan daerah, maka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan sarana untuk mengevaluasi dari keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan daerah serta untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan yang direncanakan, telah dilakukan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan sasaran yang akan dicapai serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada Rapat Paripurna tanggal 3 Juni 2024 Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 untuk dapat dibahas dan disepakati menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dari pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara.
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
d. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

Tujuan dan sasaran dari pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui realisasi pendapatan, belanja dan SILPA dari pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
b. Untuk mengetahu apakah Program, Kegiatan dan Anggaran yang ditampung dalam APBD dan Perubahan APBD Tahun 2023, telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah digunakan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.
c. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan program, kegiatan dan penggunaan anggaran yang terdapat dalam APBD dan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Dipindai dengan CamScanner

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang dituangkan dalam Perda Nomor : 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang kemudian di rubah dengan Perda Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, terdiri dari komposisi sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 6.476.334.990.207,- yang terdiri dari PAD sebesar Rp. 3.034.554.065.207,- Pendapatan Transfer sebesar Rp. 3.426.592.807.500,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.15.188.117.500,-
2. Belanja Daerah sebesar Rp. 6.745.614.683.086,- yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 4.729.827.769.310,-, Belanja Modal sebesar Rp. 1.065.481.244.507,- , Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.314.904.651,- dan Belanja Transfer sebesar Rp. 944.990.764.618,-
3. Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 289.279.692.879,- dan Pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk tambahan penyertaaan modal pada PT. Bank Nagari sebesar Rp. 20.000.000.000,-.

Dari pelaksanaan APBD Tahun 2023 tersebut, sampai akhir tahun anggaran 2023 dapat direalisasikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah realisasinya sebesar Rp. 6.263.878.436.851,68 atau 96.72 % yang terdiri dari PAD sebesar Rp. 2.784.774.801.212,68,- atau 91.77 %, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 3.464.761.720.139,- atau 101.11 % dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 14.341.915.500,- atau 94.43 %.
2. Belanja Daerah realisasinya sebesar Rp. 6.352.991.353.499,87,- atau 94.18 %, yang terdiri dari Belanja Operasioanal sebesar Rp. 4.419.911.196.951,35,- atau 93.45 %, Belanja Modal sebesar Rp. 991.975.692.930,52- atau 93.10 %, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 0 atau 0 % dan Belanja Transfer sebesar Rp. 941.104.463.618,- atau 99.59 %.
3. Penerimaan pembiayaan realisasinya sebesar Rp. 289.560.461.073,38,- atau 100.10 %, dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000.000,- atau 100 %.

Melihat pada capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Tahun 2023 tersebut, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah belum maksimal, baik pada aspek pendapatan maupun belanja daerah. Pada aspek pendapatan daerah, penerimaan dari PAD yang merupakan kinerja utama pendapatan realisasi hanya sebesar 91.77 %, lebih rendah dari Tahun 2022. Ini merupakan kondisi yang kontradiksi dimana objek pajak bertambah dan pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi penerimaan berkurang.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian juga halnya dengan belanja. Pada satu sisi, terdapat kekurangan target pendapatan daerah cukup besar yaitu sebesar Rp. 212.456.553.419,-, tetapi pada sisi lain sisa belanja juga cukup besar yaitu sebesar Rp. 392.623.329.587,-. Terdapat kecenderungan menahan belanja. Semestinya apabila target pendapatan tidak tercapai, tentu sisa belanja semakin sedikit. Kondisi ini menunjukan cukup banyak kegiatan-kegiatan yang sengaja tidak dilaksanakan agar tidak terjadi gagal bayar.

Pada aspek efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sebagaimana terlihat dari LHP BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dan LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, juga belum begitu baik. Meskipun opini dari Laporan Keuangan WTP, akan tetapi masih banyak terdapat temuan pada SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan jumlah 29 temuan dan 113 rekomendasi dengan kerugian daerah sebesar Rp. 5.491.349.321.79,- dan bahkan temuan tersebut sebagian merupakan temuan yang berulang yang disebabkan oleh karena kesalahan perencanaan dan kelemahan dalam pengawasan.

Demikian juga pada aspek keselarasan antara realisasi anggaran dengan capaian target kinerja program dan kegiatan yang terlihat dalam LKPJ. Meskipun capaian target kinerja program dan kegiatan telah banyak yang di atas target, akan tetapi dari target kinerja RPJMD dan 4 (empat) Progul masih cukup banyak targer utamanya yang belum tercapai.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Pendapatan Daerah

Secara umum, kinerja pengelolaan pendapatan daerah belum maksimal, dimana realisasi secara keseluruhan baru mencapai 96.72 % dengan rincian realisasi PAD yang merupakan indikator utamanya hanya sebesar 91.77, pendapatan transfer sebesar 101.11 % dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 94.43 %.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target PAD yang ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.034.554.065.207,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.784.774.801.212,68,- atau 91.77 %, dengan rincian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 2.236.722.695.545,- atau 90.80 %, restribusi daerah sebesar Rp. 16.049.240.433,- atau 70.73 %, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 117.084.599.941,- atau 99.84 % dan Lain-Lain PAD Yang sah sebesar Rp. 414.918.265.293,68,- atau 96.24 %.

Dipindai dengan CamScanner

Terkait dengan realisasi PAD tersebut, terdapat beberapa pos yang realisasinya lebih rendah dari tahun 2022, yaitu :

- Realisasi PKB sebesar Rp. 811.565.504.450,- lebih rendah dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 853.903.980.750,-.
- Realisasi BBNKB sebesar Rp. 401.816.543.050,- lebih rendah dari tahun 2022 sebesar Rp. 421.048.102.200,-.
- Realisasi Pajak rokok sebesar Rp. 425.078.941.403,- lebih rendah dari Tahun 2022 sebesar Rp. 440.621.645.772,-.
- Realisasi Pendapatan BLUD sebesar Rp. 351.600.313.300,21 lebih rendah dari tahun 2022 sebesar Rp. 381.627.097.936,-.
- Realisasi Restribusi Daerah sebesar Rp. 16.049.240.433,- atau hanya 70.73 % dan merupakan capaian yang terendah dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Melihat perbandingan realisasi penerimaan dari PAD Tahun 2023 dan Tahun 2022 tersebut, terdapat kondisi yang tidak simetris. Pada satu sisi terdapat penambahan objek penerimaan dan pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 lebih tinggi dari Tahun 2022, tetapi penerimaan justru berkurang. Kondisi ini menujukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan PAD.

Dari informasi yang disampaikan oleh TAPD, tidak tercapainya target penerimaan PAD disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- Tidak tercapainya target di pos PKB (pajak kendaraan bermotor) disebabkan oleh karena kebijakan dari program 5 untung yang berdampak pada penerimaan tahun 2023 serta terlalu tingginya estimasi yang ditetapkan.
- Berkurangnya minat masyarakat membeli kendaraan baru oleh karena perekonomian daerah belum Kembali pada posisi sebelum terjadinya covid-19 serta tertalu tingginya estimasi yang ditetapkan.
- Terlalu tingginya estimasi dan penetapan target pajak rokok tidak mempedomani PMK tentang realisasi penerimaan pajak rokok tahun sebelumnya yang menjadi rujukan untuk perencanaan tahun berikutnya.
- Pajak Air Permukaan (PAP) PLTA Koto Panjang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tidak lagi menjadi hak Provinsi Sumatera Barat sebagai asal sumber air, tetapi menjadi hak provinsi Riau sebagai daerah pemanfaat.

Namun demikian, disamping faktor-faktor tersebut di atas, Badan Anggaran juga melihat tidak tercapainya target PAD tersebut, juga disebabkan oleh tidak optimalnya kinerja OPD-OPD terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah, kurangnya inovasi dan kreativitas serta lemahnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah. disamping itu, kerjasama pemanfaatan asset daerah dengan pihak ketiga belum menguntungkan kepada Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Badan Anggaran merekomendasikan kepada Gubernur sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap personal, tata kerja, system, program/kebijakan dan remunirasi yang diberikan kepada aparat terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah dan upaya mengoptimalkan pendapatan daerah.
2. Menginventarisasi kembali semua potensi dan objek pajak dan restribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka perencanaan target pendapatan yang lebih akurat.
3. Meninjaukan kembali kerjasama pemanfaatan asset daerah dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
4. Pengelolaan terminal, sebaiknya kerjasama dengan pihak ketiga agar tidak memberatkan APBD.
5. Melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja BLUD RSUD, baik terhadap personal, pelayanan, sarana dan prasarana dan sistem kerja di RSUD, agar kinerja RSUD dapat lebih meningkat dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

b. Pendapatan Transfer

Target penerimaan dari pendapatan transfer yang ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.426.592.807.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.464.761.720.139,- atau 101.11 %. Dari capaian realisasi pendapatan transfer tersebut, menunjukan bahwa kinerja pengelolaan pendapatan transfer telah optimal dan pendapatan transfer ini pun sifatnya sudah given atau ditetapkan langsung oleh Pemerintah.

Namun demikian untuk mendapatkan alokasi dana transfer yang lebih besar, maka Badan Anggaran mendorong Pemerintah Daerah untuk terus membangun koordinasi dengan Kementerian terkait terutama agar mendapatkan alokasi DBH (dana bagi hasil pajak dan bukan pajak) yang lebih besar sesuai dengan potensi yang kita miliki, terutama dari DBH sawit, gas dan perikanan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Target yang ditetapkan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebesar Rp.15.188.117.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.341.915.500,- atau 94.43 %. Memperhatikan capaian realisasi dari lain-lain pendapatan daerah yang sah tersebut, telah cukup baik. Namun demikian, terkait dengan penerimaan dari sumbangan pihak ketiga, Badan Anggaran melihat masih bisa

Dipindai dengan CamScanner

ditingkatkan dari Perusahaan, BUMN dan Swasta Besar yang beroperasi di Sumatera Barat yang bergerak di sektor energi, sawit dan sektor lainnya.

2. **Belanja Daerah.**

Alokasi belanja daerah yang disediakan pada Perubahan APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.745.614.683.086,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.352.991.353.499,87,- atau 94.18 % dengan sisa belanja sebesar Rp. 392.623.329.587,- dengan rincian realisasi belanja operasi sebesar Rp. 4.419.911.196.951,35 atau 93.45 %, belanja modal sebesar Rp. 991.975.692.930,52 atau 93.10 %, belanja tidak terduga tidak ada realisasi sama sekali dan belanja tranfer sebesar Rp. 941.104.463.618,- atau 99.59 %.

Memperhatikan realisasi dan sisa belanja yang cukup besar, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja dalam pelaksanana program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD, belum optimal. Disamping itu, terdapat 5 (lima) OPD yang realisasi belanjanya di bawah 90 %, yaitu RSUD Ahmad Mohctar Bukittinggi sebesar 88.84 %, RSUD M Natsir sebesar 88.86 %, Dinas Koperasi dan UMKM sebesar 81.13 %, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar 89.03 % dan Badan Pendapatan daerah sebesar 85.04 %. Besarnya sisa belanja tersebut, tentu tidak hanya dari efisiensi, akan tetapi tentu juga bersumber dari kegiatan yang tidak dilaksanakan atau yang putus kontrak.

Terhadap OPD-OPD yang realisasi belanja masih rendah tersebut, tentu akan berdampak terhadap capaian kinerja program dan kegiatan serta capaian target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang menjadi tugas dan kewajiban OPD.

a. Belanja Operasi.

Untuk belanja operasi, dialokasikan sebesar Rp. 4.729.827.769.310,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.419.911.196.951,35 atau 93.45 %. Dari aspek realisasi kinerjanya telah cukup maksimal, namun dari aspek efektivitas, efisiensi, dan proporsionalitas, alokasi dari belanja operasi tersebut belum proporsional, belum efektif dan belum efisien untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa catatan sebagai berikut :

1) Sisa belanja operasi masih cukup besar yaitu sebesar Rp. 309.916.572.358 Hal ini disebabkan adanya kebijakan rasionalisasi dan recofusing oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas, tidak sesuai dengan target kinerja RPJMD dan rasionalisasi perjalanan dinas. Kebijakan tersebut, dilakukan dengan pertimbangan bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh TAPD, diperkirakan penerimaan pendapatan

Dipindai dengan CamScanner

hanya sebesar 91 %. Untuk mengantisipasi terjadinya gagal bayar, maka dilakukanlah rasionalisasi dan recofusing kegiatan-kegiatan OPD.

2) Terdapat sisa belanja pegawai masih cukup besar yaitu Rp. 150.557.828.411,- terutama pada Dinas Pendidikan. Besarnya sisa belanja pegawai tersebut disebabkan belum dibayarkan Tunjangan Hari Raya Guru Daeran, tambahan profesi guru (DAK), tambahan penghasilan guru serta pengangkatan PPPK lebih sedikit dari formasi. Besarnya sisa belanja pegawai merupakan kejadian yang terus berulang setiap tahunnya.
3) Alokasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 240.783.824.000,- belanja ATK sebesar Rp. 5.986.163.543,- Belanja cetak sebesar Rp. 21.383.388.025,- belanja bahan/alat kantor sebesar Rp. 29.953.170.764,- belanja makan minum sebesar Rp. 88.935.730.826,- belanja jasa iklan, reklame, film dan pemotretan sebesar Rp. 10.590.079.432,- belanja sewa hotel sebesar Rp. 44.654.129.759,- dan belanja bimtek sebesar Rp. 22.578.126.005,- menunjukan ketidak efisienan dan ketidak efektifan alokasi anggaran.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Badan Anggaran merekomendasikan sebagai berikut :

1) Alokasi belanja pegawai harus dihitung secara cermat dan akurat dengan berpedoman pada data base kepegawaian yang rill, realisasi anggaran tahun sebelumnya, mutasi kepegawaian serta acres. Pos belanja pegawai Untuk kedepannya dapat dihitung secara lebih proporsional.
2) Rasionalisasi dan recofusing anggaran OPD perlu dilakukan secara lebih cermat dengan memperhatikan target kinerja program dan kegiatan serta target kinerja RPJMD. Jangan sampai rasionalisasi dan recofusing berdampak terhadap tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.
3) Untuk ke depan, alokasi belanja perjalanan dinas, ATK, makan-minum, bahan cetak, reklame, belanja sewa, dll, harus di kurangi secara signifikan dan dialihkan pada pos belanja modal yang alokasinya masih jauh dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu sebesar 40 % dari total belanja daerah.

b. Belanja Modal.

Alokasi belanja modal yang disediakan pada Perubahan APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.065.481.244.507,- dengan realisasi sebesar 991.975.692.930,52,- atau 93.10 %. Memperhatikan alokasi dan realisasi belanja modal tersebut, Badan Anggaran memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

1) Alokasi belanja modal masih rendah yaitu baru sebesar 15 % dari total belanja daerah yang terdapat dalam Perubahan APBD Tahun 2023. Kondisi ini belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu sebesar 40 % dari total belanja APBD.
2) Alokasi belanja pemeliharan jalan, jembatan dan irigasi masih sangat rendah yaitu hanya sebesar Rp. 40.894.146.038,- jauh di bawah alokasi belanja perjalanan dinas, makan-minum dan belanja operasional lainnya. Akibat rendahnya alokasi anggaran tersebut, berdampak terhadap kualitas infrastruktur yang terdapat di Sumatera Barat. Banyak jalan-jalan, jembatan dan irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi rusak dan bahkan rusak parah. Padahal kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi ini, sangat berpengaruh terhadap perekonomian dan kesejahteraan amsyarakat.
3) Sampai tahun ke 4 masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, masih banyak proyek-proyek strategis daerah yang belum tuntas pembangunan diantaranya stadium utama, gedung budaya, jalan Pantai Padang menuju bandara BIM dan proyek lainnya. Ini tentu sangat merugikan daerah, karena anggaran yang cukup besar telah digunakan untuk pembangunnya, belum dapat dimanfaatkan.
4) Masih cukup banyak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan proyek fisik, seperti pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesikasi, tidak tepat waktu dalam penyelesaianya, putus kontrak, kurang volume dan memasukan kegiatan fisik pada Perubahan APBD sebagaimana termuat dalam LHP BPK. Hal ini disebabkan oleh karena belum matangnya perencanaan dan lemahnya pengawasan.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Badan Anggaran merekomendasikan sebagai berikut :

1) Meningkatkan alokasi anggaran belanja modal terutama belanja pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi secara terus menerus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan menguragi secara signifikan alokasi belanja perjalanan dinas, ATK, makan-minum dan belanja operasi lainnya.
2) Mengalokasi anggaran yang mencukupi atau mencari sumber pembiayaan lainnya untuk menuntaskan proyeks-proyek strategis daerah yang belum tuntas, agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
3) Menyelesaikan proyek-proyek yang masih terbangkalai agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4) Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan pengawasan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan kegiatan.

Dipindai dengan CamScanner

Disamping permasalahan tersebut di atas, Badan Anggaran juga melihat terdapat permasalahan-permasalahan teknis dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada beberapa OPD, diantaranya :

1) Cukup banyaknya kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 223 yang mencapai 55 paket kegiatan dengan anggaran mencapai sebesar Rp.9.125.999.209,- tentu akan berdampak terhadap pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Anggaran mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan rasionalisasi anggaran, perlu memperhatikan capaian trget kinerja program dan kegiatannya.
2) Pengadaan makan dan minum bagi siswa SMK 3 Sumbar di Kabupaten Pasaman yang dilakukan oleh 2 (dua) rekanan yang berbeda, akan dapat menimbulkan kondisi yang tidak sehat dan berdampak terhadap keberlanjutan pendidikan siswa. Oleh sebab itu, Badan Anggaran merekomendasikan rekanan pengadaan makan dan minum bagi siswa SMK 3 Sumbar yang siswa mandiri maupun siswa regular cukup dilakukan oleh 1 (satu) rekanan yang profesional, sehingga lebih mudah mengawasinya.
3) Sumbangan komite bersifat tidak mengikat sesuai dengan Permendikbud no 75 Tahun 2016 dan tidak mengikat walimurid. Penggunaannya harus transparan dan dilakukan pemeriksaan secara rutin. Sumbangan komite tidak ada berhubungan dengan proses belajar dan mengajar siswa, agar siswa tidak merasa tertekan dan terganggu. Sumbangan komite juga tidak berhubungan dengan pelaksanaan ujian siswa, pengambilan raport siswa dan pengambilan ijazah siswa.
4) Program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD setiap tahunnya cenderung bersifat copy paste dan kurangnya inovasi untuk menghasilkan output yang lebih baik. Oleh sebab itu, ke depan OPD-OPD harus lebih inovatif untuk mengembangkan program dan kegiatan yang dapat menghasilkan output yang lebih berkualitas dan lebih efisien dan efektif.
5) Masih cukup banyak kegiatan-kegiatan yang telah rampung pelaksanaannya di akhir tahun 2023 tetapi belum dibayarkan dan kegiatan-kegiatan yang diluncurkan penyelesaiannya pada tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Anggaran mengingatkan kepada OPD terkait dan TAPD untuk mengalokasikan anggarannya pada Perubahan APBD tahun 2024.
6) Terdapat sisa anggaran yang cukup besar pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu sebesar Rp. 24.941.360.083,-. Hal ini disebabkan oleh karena banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dijalankan, oleh karena daftar kegiatan tidak terdapat dalam SIPD dan disamping itu juga terdapat kelemahan manajemen kepemimpinan di OPD tersebut. Sehubungan dengan permasalahan dan kondisi tersebut,

Dipindai dengan CamScanner

agar Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk mengusulan penyempurnaan pergub Analisa Standar Belanja (ASB) dengan memasukan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tidak masuk dalam SIPD yang merupakan usulan dan permintaan Masyarakat agar semua kegaiatan pada dinas termasuk Pembangunan Jalan Usaha Tani dapat direalisasikan.

c. Belanja Tidak Terduga (BTT).

Alokasi belanja BTT yang disediakan pada Perubahan APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.314.904.651,-. Sampai akhir tahun 2023, realisasinya masih nol. Tidak teralisasinya BTT ini, perlu menjadi perhatian bersama, oleh karena pada tahun 2023 cukup banyak terjadi bencana di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat, tetapi realisasinya tidak ada sama sekali. Hal ini menunjukan lambatnya respon OPD terkait dalam menyikapi bencana yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Badan Anggaran merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk merealisasikan BTT pada setiap terjadinya bencana di wilayah Sumatera Barat, oleh karena bantuan tersebut sangat di butuhkan oleh Masyarakat yang mengalami bencana.

d. Belanja Transfer.

Alokasi belanja transfer yang disediakan pada Perubahan APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 944.990.764.618,- dengan realisasi sebesar Rp. 941.104.463.618,- atau 99.59 % yang digunakan belanja bagi hasil dan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan capaian realisasi belanja transfer tersebut, bagus dengan realisasi mencapai 99.59 %. Namun, Badan Anggaran mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk segera melunasi sisa hutang bagi hasil pajak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum dilunasi, berhubung pada tahun 2025 tidak lagi menggunakan skema bagi hasil tetapi menggunakan opsen kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sedangkan terkait dengan belanja bantuan keuangan, Badan Anggaran meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, jangan sampai dialihkan sebagaimana yang telah ditetapkan dari Peraturan Gubernurnya.

Dipindai dengan CamScanner

3. **Pembiayaan Daerah.**

a. Penerimaan Pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan yang direncanakan pada Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 269.279.692.879,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 269.560.461.073,38 atau 100.10 % ,- yang bersumber dari sisa belanja, baik dari efisiensi, kegiatan yang tidak terlaksana dan kegiatan yang tidak tercapai capaian target kinerjanya.

b. Pengeluaraan Pembiayaan.
Pengeluaraan pembiayaan yang disediakan pada Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 20.00.000.000,- yang digunakan untuk tambahan penyertaan modal pada PT. Bank Nagari dapat direalisasikan seluruhnya.

Dari realisasi penerimaan dan pengeluaraan pembiayaan daerah tersebut, sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp. 180.447.544.426,19.,-

4. **Penyelesaian Temuan LHP BPK.**

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, terdapat sebanyak 29 temuan dan rekomendasi dengan kerugian daerah sebesar Rp. 5.491.349.321,79. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017, terhadap temuan tersebut, wajib ditindak lanjuti paling lama 60 (enam puluh) hari sejak LHP di terima.

Sehubungan dengan temuan LHP BPK tersebut, baik LHP tahun 2023 maupun LHP tahun-tahuh sebelumnya, masih banyak yang progres tindak lanjutnya masih rendah. Agar permasalahan temuan BPK tersebut tidak menimbulkan masalah hukum, maka Badan Anggaran merekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan OPD terkait agar segera menyelesaikannya dalam jangka waktu paling lambat 60 Hari sejak LHP diterima tanggal 20 Mei 2024, baik dalam bentuk penyelesaian administratif maupun dalam bentuk pengembalian uang.

Untuk pengembalian kerugian keuangan daerah yang jumlahnya cukup besar dan Menyulitkan untuk dibayar sekaligus, maka Badan Anggaarn merekomendasikan penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme SKTJM (surat tanggungjawab mutlak).

D. KOMPOSISI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2023

Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggarn Bersama TAPD dan OPD-OPD terkait terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dipindai dengan CamScanner

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 serta memperhatikan hasil audit yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, maka komposisi dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumaterea Barat Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	Rp. 6.263.878.436.851,68,-
	a. PAD	Rp. 2.784.774.801.212,86,-
	b. Pendapatan Transfer	Rp. 3.464.761.720.139.00,-
	c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah	Rp. 14.341.915.500.00,-
2.	Belanja Daerah	Rp. 6.352.991.353.499,87,-
	a. Belanja Operasional	Rp. 4.419.911.196.951,35,-
	b. Belanja Modal	Rp. 991.975.692.930,52,-
	c. Belanja Tak Terduga	Rp. -
	d. Belanja Transfer	Rp. 941.104.463.618.00,-
3.	Pembiayaan Daerah	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 289.560.461.073.38,-
	b. Pengeluaraan Pembiayaan	Rp. 20.000.000.000.00,-
4.	SILPA	Rp. 180.447.544.425,19,-

E. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI

Dari pendapat akhir Fraksi-Fraksi tersebut, pada prinsipnya Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat menyetujui hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan Tingkat kedua dalam Rapat paripurna. Disamping itu, Fraksi-Fraksi juga memberikan catatan dan masukan terkait dengan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya :

1. Secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023, masih belum optimal dan banyak kelemahan-kelemahan, baik pada aspek pendapatan maupun belanja daerah. oleh sebab itu, Gubernur perlu melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kebijakan, sistem, SOP, SDM dan semua potensi penerimaan daerah.
2. Melakukan efisien terhadap anggaran perjalanan dinas, ATK, makan-minum, dan anggaran pendukung lainnya dan mengalihkan anggaran untuk peningkatan belanja modal yang porsinya masih jauh dari alokasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
3. Mempedomani catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran dari hasil pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 ini, dalam penyusunan Perubahan APBD tahun 2024 dan APBD Tahun 2025.

Pendapat akhir fraksi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan hasil pembahasan Badan Anggaran tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 yang perlu disikapi dan menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait.

Dipindai dengan CamScanner

F. PENUTUP

Demikianlah laporan hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama TAPD dan OPD-OPD dilingkup Pemerintah Daerah terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan pada Rapat Paripurna ini. Demikian, terima kasih. Billahitaufiq walhidayah. Wss.wr.wb

BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT,

KETUA,

SUPARDI, SH

SEKRETARIS,

H. RAFLIS, SH, MM
NIP. 19640930 198602 1 002

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI GERINDRA
(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

GERINDRA

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

- **Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan PBD Tahun 2023**
- **Ranperda tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045**

dan

- **Ranperda Tentang Perseroda Penjamin Kredit Daerah**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sumatera Barat
SENIN, 10 Juni 2024

Juru Bicara : .....

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang terhormat

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah/Asisten/Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP, Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin dan undangan yang kami muliakan

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 443391 - 7059325 - 7059328 Fax. (0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.ig

Dipindai dengan CamScanner

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan

Alhamdulilahirabbil a'lamin, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semua hari ini, pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat hari ini.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat, atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Gerindra menyampaikan Pandangan Umum terkait *Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2023, Ranperda tentang RPJPD tahun 2025-2045 dan* Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah

Bapak ibu Peserta Rapat Paripurna Sekalian.

I. **Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat TahunAnggaran 2023**

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut, akan dapat diketahui, apakah pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara efektif, efisien dan transparan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan target pembangunan daerah dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD yang telah diaudit oleh BPK, paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Untuk memenuhi kewajibannya tersebut, pada Rapat Paripurna DPRD Senin tanggal 3 Juni 2024 lalu, Saudara Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, untuk selanjutnya di bahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dari pembahasan akan dapat mengukur sejauhmana anggaran yang telah digunakan dapat mewujudkan target kinerja pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta menemukan permasalahan, kelemahan serta dapat merumuskan upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Saudara Pimpinan, Gubernur dan Hadirin yang Berbahagia..

Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 itu, kami telah mempelajari dan menelaah Nota Pengantar Gubernur. Karni ingin menyampaikan beberapa hal berupa Pandangan, Pendapat dan Pertanyaan sebagai berikut :

1. **Mohon penjelasan Saudara Gubernur** mengapa capaian pendapatan daerah di tahun 2023 tidaklah memuaskan, karena hanya terealisasi Rp.6,263 Triliun atau 96,72 persen dari jumlah Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 6,476 Triliun.

Dipindai dengan CamScanner

2. Dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD), capaiannya juga relatif kecil dibanding target dan capaian tahun sebelumnya, dimana angka realisasi hanya 91,77 persen. Pajak daerah yang menjadi komponen pendukung PAD, capaiannya hanya 90,80 persen. Dan yang lebih parah lagi adalah komponen retribusi daerah dengan capaian hanya 70,73 persen saja. **Mohon dijelaskan penyebabnya.**
3. Fraksi Partai Gerindra melihat, angka-angka dalam proyeksi dan capaian pendapatan daerah selama ini masih belum sesuai, bahkan jauh dari target yang dituangkan dalam RPJMD. Dalam RPJMD tertulis angka Pendapatan Daerah pada tahun 2023 adalah Rp 7,067 Triliun dan PAD adalah Rp 3,083 Triliun. Namun pada akhirnya, target yang dipatok masih jauh dari angka tersebut. Fraksi Partai Gerindra meminta agar kedepan, proyeksi dan capaian Pendapatan Daerah ini bisa disesuaikan dengan apa yang telah dituangkan dalam RPJMD.
4. Kesuksesan seorang kepala daerah menurut hemat kami adalah mampu meningkatkan pendapatan daerah. Fraksi Partai Gerindra melihat dan menduga, target-target pendapatan yang dipasang selama ini cenderung dibawah potensi pendapatan yang ada. Banyak potensi yang belum tergalii secara optimal. Mohon penjelasan Saudara Gubernur terhadap hal ini.
5. Terkait dengan sumber pendapatan, kami **mohon penjelasan** dari Saudara Gubernur dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah, serta BUMD yang kita miliki. Kami minta ini bisa dijelaskan secara rinci dan detail.
6. Kami mendengar kabar adanya pergantian nama Hotel Novotel Bukittinggi menjadi Triple Tree. **Mohon penjelasan** terkait hal ini dan bagaimana skema kerjasamanya. Kami menangkap seolah terjadi pembiaran.

Dipindai dengan CamScanner

7. Kami juga mohon penjelasan perkembangan tentang Balairung. Ada informasi, Balairung juga sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
8. Mengenai serapan anggaran, kami melihat rata-rata Dinas di Progul Pertanian realisasi anggarannya hanya 91,45 persenseperti Urusan tanaman pangan holtikultura. **Mohon penjelasan, Kenapa ini bisa terjadi,** dan bagaimana upaya agar di tahun 2024 ini realisasinya bisa lebih baik lagi. Kami minta ini perlu penekanan realisasi yang serius.
9. Kami juga mohon penjelasan kenapa realisasi serapan anggaran pada urusan-urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti Urusan Kesehatan dan Pekerjaan Umum Penataan Ruang, angkanya juga dibawah 95 persen. Bahkan, Urusan Pendidikan yang harusnya menjadi perhatian serius realisasinya hanya 93,86 persen, padahal SKPD ini melaksanakan 4 program, 14 kegiatan dan 105 sub kegiatan.

10. Fraksi Partai Gerindra meminta Saudara Gubernur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinas atau OPD yang tidak bisa merealisasikan anggaran diatas 95 persen, karena ini bisa berpotensi mengganggu kinerja pemerintah daerah. Proses evaluasi bisa dilakukan dengan benar-benar menerapkan Merit Sistem, dimana penempatan seseorang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. **Mohon tanggapannya.**
11. Fraksi Partai Gerindra mendorong banyaknya pembangunan, demi meningkatkan kualitas pelayaan publik. Tapi dari fakta kami terima, masih banyak proyek-proyek pembangunan yang mangkrak. Mohon ini jadi catatan, agar persoalan serupa tidak terulang lagi tahun 2024 ini atau tahun-tahun berikutnya. Saudara Gubernur perlu memastikan pembangunan bisa

Dipindai dengan CamScanner

terlaksana sesuai perencanaan, terlaksana dengan lebih baik tanpa adanya resiko hukum. Fraksi Partai Gerindra sesungguhnya sangat sedih dan tak rela jika ada aparatur brokrasi di pemerintahan daerah, apalagi sampai kepala daerah yang terjerat, atau bermasalah dengan hukum. **Mohon tanggapannya**

12. Terakhir, **mohon penjelasan** kembali, sejauh mana penanganan persoalan BUMD yang sudah menahun, terutama berkaitan dengan Likuidasi PT.Andalas Tuah Sakato, Dinamika, Grafika ?

Bapak ibu Hadirin yang Berbahagia..

II. **Ranperda Tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, bahwa Pembangunan Daerah adalah bagian dari Pembangunan Nasional, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Sebagaimana kita ketahui, masa berlaku RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 akan segera berakhir. Maka sesuai ketentuan Pasal 18 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD tersebut berakhir, perlu disusun RPJPD selanjutnya yaitu RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Terkait hal itu, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua pukuh) tahun. Dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat pada setiap periode tahapan pelaksanaan RPJPD, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok. **Menurut hemat Fraksi Partai Gerindra.** proses penyusunan haruslah bersifat partisipatif dengan melibatkan semua unsur pembangunan daerah. **Mohon tanggapan** Saudara Gubernur terkait hal ini.
2. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024, RPJPD tahun 2025-2045 disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045. Artinya, RPJMD Tahun 2025-2045 diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045, sebagaimana pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tentang penyelerasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. **Mohon penjelasan, apakah target-target capaian kinerja yang ada di RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045 ini sudah berada pada angka optimistis?, karena banyak yang menilai, targetnya masih berada pada angka pesimistis** dibanding yang di tetapkan oleh pusat.
3. Mohon penjelasan dari Saudara Gubernur, apakah Penyusunan RPJPD ini telah mempertimbangkan berbagai prinsip pembangunan berkelanjutan dan RTRW Prrovinsi Sumatera Barat yang juga sedang disusun?

Dipindai dengan CamScanner

III. **Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah**

Berkaitan dengan Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian ini menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah. Relasi antara BUMD dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut tergambarkan manakala BUMD dibagi menjadi dua jenis, yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Dalam Pasal 8 PP BUMD, BUMD Perumda tugasnya lebih difokuskan pada kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan BUMD Perseroda yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) yang lebih berorientasi untuk menghasilkan laba. **Mohon penjelasan,** apa implikasi perubahan bentuk hukum perusahaan terhadap sifat layanan yang diberikan perusahaan kepada masyarakat selama ini?
2. **Mohon penjelasan** dari Saudara Gubernur, apa persoalan Tata Kelola BUMD kita di Sumatera Barat selama ini dan bagaimana langkah perbaikan yang dilakukan?
3. Sesuai semangatnya, Perseroda Penjamin Kredit Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM, sekaligus memberdayakan Koperasi dan UMKM dimaksud. **Mohon**

Dipindai dengan CamScanner

penjelasan, apakah keberadaan perusahaan-perusahaan BUMD, termasuk Perusahaan penjamin kredit ini sudah memberikan dampak dan manfaat positif bagi masyarakat?

4. Dalam catatan OJK Sumatera Barat, pada periode Januari hingga November 2023 ada 3.202 aduan masyarakat Sumatera Barat yang tercatat dalam Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), berkaitan dengan Pinjaman Online atau Pinjol ilegal serta penawaran investasi illegal. Kami menduga sebagian yang terjerat ini adalah masyarakat usaha kecil dan menengah. DPRD sudah pernah menggagas munculnya program siMAMAK, Subsidi Bunga yang diperuntukkan bagi usaha super mikro yang sebelumnya terdampak pandemi COVID. Sampai hari ini, kami belum mendengar dan melihat program tersebut direalisasikan. **Kami mohon penjelasan terkait ini.**
5. Salah satu program unggulan Saudara Gubernur-Wakil Gubernur, sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah Sumatera Barat adalah, ingin mencetak 100 ribu *milenial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif. Kami ingin mendapat penjelasan secara rinci terkait hal ini. Bagaimana progressnya dan sudah berapa banyak yang dilahirkan. **Mohon penjelasan**

Pimpinan, **Gubernur dan Hadirin yang Berbahagia..**

Demikian Pandangan Umum Farksi Partai Gerindra tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, Ranperda tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-

Dipindai dengan CamScanner

205, dan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah ini kami sampaikan.

Dengan kerendahan hati, kami juga menyampaikan permohonan maaf pada hadirin dalam sidang paripurna yang terhormat ini, jika ada salah kata dan penyampaian kami. Tak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan itu adalah milik Allah SWT semata.

Wabillahitaufik wal hidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Salam Indonesia Raya !!!

FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua	Sekretaris
H. HIDAYAT, S.S, M.H	NURKHALS DT.BIJO DIRAJO, S.Pt

FRAKSI PARTAI GERINDRA GERAKAN INDONESIA RAYA DPRD PROV. SUMBAR

Dipindai dengan CamScanner

Penasihat:

1. Supardi

Anggota:

2. Desrio Putra
3. Evi Yandri Rajo Budiman
4. Ismunandi Syofyan, SE
5. Jempol
6. Khairuddin Simanjuntak
7. Mario Syahjohan
8. Mesra
9. Mukhlis Yusuf Abit, ST,M.M
10. Drs.H.Syafruddin Putra Dt.Sungono, M.Si
11. Jasma Juni Dt. Gadang, MSi
12. Hj.Yunisra Syahiran, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
PKS
Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

1. **Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023**
2. **Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045**
3. **Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Juni 2024 oleh juru bicara Mochklasin,S.Si

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Yth: Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Yth: Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
Yth: Saudara Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat
Yth: Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat
Yth: Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat
Yth: Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan, Kantor,Pimpinan BUMN dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik, LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama kami ingin mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa mengucapkan puji syukur atas nikmat Allah SWT, serta memuji dan memujaNya karna telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada

Dipindai dengan CamScanner

acara rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov insi Sumatera Barat. *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, *Amin*..

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia

1. Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2023

Pertama kami ucapkan selamat kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan seluruh OPD yang sudah bekerja keras dalam mempertahankan budaya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari LHP BPK terhadap pelaksanaan APBD 2023. Sesuai dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 320 Ayat (1) yang berbunyi " Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir." Serta PP No 12 Tahun 2019 Pasal 194 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka Fraksi PKS menyambut baik nota pengantar yang disampaikan oleh Gubernur ini, untuk segera dibahas bersama DPRD.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan telah terwujudnya target pembangunan daerah dengan rasa keadilan dan merata ditengah masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi kinerja pemerintah provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yang sudah berusaha maksimal dalam menjalankan program-program kerja, membuat capaian-capaian dan serta berusaha merealisasikan target-target yang di buat. Walaupun mengalami problematika yang cukup kompleks dikarenakan defisit anggaran pada APBD-P 350 Miliar, pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat dapat mengantisipasi sehingga program-program berjalan lancar.

Sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat, maka DPRD berwenang untuk mengawasi pertanggungjawaban APBD untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

APBD 2023 merupakan tahun ketiga dari bejalannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan daerah.

Selama tahun 2023 kinerja pemerintah provinsi Sumatera Barat cukup banyak menorehkan prestasi, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai wujud dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul, Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat ke 7 Nasional. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi atas pencapaian itu, begitupun pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif cukup meningkat. Akan tetapi masih ada yang belum maksimal di sektor lain.

Setelah membaca dan membahas Nota Ranperda tentang Pertanggungjawan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, dan setelah kami menelaah beberapa hal yang melatar belakangi pengajuan

Dipindai dengan CamScanner

Nota Pengantar Ranperda ini ada beberapa point yang ingin kami sampaikan diantaranya sebagai berikut:

1. Melihat semakin meningkatnya kebutuhan anggaran, disisi lain makin sulitnya penambahan dana transfer daerah bahkan cenderung berkurang dan penggunaannya pun banyak yang sudah di arahkan, maka perlu pemprov melakukan inovasi dan terobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kondisi ini ditambah pemberlakuan opsen untuk penerimaan pendapatan daerah dari kendaraan bermotor. Pertanyaan Kami apa upaya upaya konkrit pemprov untuk bisa menambah pendapatan daerah, dan bagaimana upaya itu benar-benar bisa dilaksanakan?.
2. Belanja barang dan jasa angkanya cukup besar lebih dari 1 Triliun, dengan kemajuan Teknologi Informasi hari ini, penerapan IT bisa mengurangi beban anggaran untuk belanja barang dan jasa, sehingga anggaran bisa lebih maksimal untuk kegiatan yang mempunyai outcome peningkatan ekonomi masyarakat. Sejauh mana upaya pemprop untuk melakukan efisiensi belanja barang dan jasa dengan pemanfaatan Teknologi informasi ini. Mohon penjelasan saudara.
3. Belanja subsidi bunga pinjaman bank nagari melalui program simamak sebesar Rp6,5 M tidak terlaksana, ini menjadi kerugian bagi pemerintah Provinsi. Dalam meningkatkan kinerja terhadap fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat khususnya sektor ekonomi yang menjadi harapan dan sorotan masyarakat. Apa kendala utama penyebab tidak terlaksananya program tersebut, apa semata mata fasilitasi Peraturan Gubernur oleh Kementrian dalam negri. Mohon penjelasan. Apakah kegagalan tidak berefek kepada capaian 100 Ribu

Dipindai dengan CamScanner

milenial enterprenuer/ Women prenuer yang merupakan program unggulan gubernur.

4. Tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif banyak menyedot anggaran hampir 1 Triliun, angka ini cukup besar untuk ukuran APBD Provinsi yang hanya 6,4 Triliun. Tentu gaji dengan kenaikan yang sangat signifikan ini, mesti dibuktikan dengan peningkatan kinerja pegawai, apa yang bisa dijelaskan tentang peningkatan kinerja pegawai sebagai wujud pertanggung jawaban anggaran dengan tambahan gaji yang angkanya cukup besar diatas?
5. Kita memiliki banyak UPTD/ OPD yang memberikan pelayanan dan retribusi daerah, namun demikian capaian pendapatan dari retribusi daerah masih rendah sekitar 70,7% dari target, mohon penjelasan penyebab tidak terealisasinya pendapatan dari sektor retribusi tersebut, dan unit mana yang masih gagal mencapai terget diatas.

2. Ranperda tentang RPJPD 2025-2045

Perencanaan pembangunan daerah memiliki fungsi yang sangat strategis untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan tersebut. Dengan akan berakhirnya periodisasi RPJPD Provinsi Sumbar Tahun 2005-2025, maka sesuai Pasal 18 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya RPJPD periode sebelumnya, harus disusun RPJPD berikutnya untuk periode 2025-2045 yang dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal.

Pada 3 Juni 2024 Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan nota pengantar mengenai RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045.

Dipindai dengan CamScanner

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, bahwa penyusunan RPJPD 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada RPJPD periode sebelumnya. Hasil evaluasi terhadap capaian RPJPD sebelumnya menjadi titik awal dalam penyusunan RPJPD 2025-2045.

Untuk mencapai Sumatera Barat yang maju 2045 maka dibutuhkan sinergitas, dan partisipasi masyarakat dan seluruh stake holder dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat, terutama terwujudkan sinergitas yang baik antar kepala daerah kabupaten/kota dengan Provinsi. Tentu dengan sinergitas antar kepala daerah, satu visi untuk memajukan Sumatera Barat, maka akan mewujudkan Sumatera Barat yang maju dan mandiri.

Diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan janga panjang daerah tahun 2025-2045 yang menyatakan bahwa seluruh tingkatan daerah dari kabupaten/kota dan provinsi untuk menyusun RPJPD tahun 2025-2045 berpedoman atau selaras dengan RPJPN tahun 2025-2045.

Ditambah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang memakai Istilah baru dengan "IMPERATIF".

Dijelaskan dalam Nota Pengantar Gubernur bahwa kata Imperatif ini bersifat memerintah atau memberi komando, bersifat mengharuskan atau bentuk perintah yang menyatakan keharusan melaksanakan perbuatan atau larangan. Hal ini berbeda dengan penyusunan RPJPD

Dipindai dengan CamScanner

sebelumnya yang bersifat partisipatif. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa terhambatnya ruang gerak pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, kami menilai bahwa pentingnya partisipasi publik agar terciptanya pemerataan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Setelah kami baca dan telaah secara seksama Nota Pengantar Gubernur mengenai Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2025-2045 ini, Kami Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Barat ingin memberikan beberapa padangan dan tanggapan umum serta pertanyaan sebagai berikut:

1. Keluarnya SE Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disebutkan bahwa dokumen RPJPD disusun secara berkualitas dan imperatif. Dalam penyusunan dokumen RPJPD yang bersifat imperatif ini, sejauh mana ruang gerak yang bisa dilakukan daerah agar dapat memunculkan kearifan lokalnya?. Mohon penjelasan saudara
2. Sebagaimana amanat dari Insruksi Mendagri tersebut, bajwa RPJPD indikator dan targetnya harus berpedoman kepada RPJPN. Dengan sebagian besar indikator dan target dalam RPJPD ini sudah diatur oleh pusat, bagaimana mencapai amanat tersebut dengan ruang gerak fiscal daerah yang sama-sama kita ketahui sangat terbatas?.
3. Sebagaimana diketahui bahwa target provinsi sebagaian besar merupakan angka agregat dari kabupaten/kota yang ada di

Dipindai dengan CamScanner

Sumatera barat,dengan target yang sudah ditentukan bagaimana menyelaraskan capaian tersebut dengan kabupaten/kota?

4. Target yang imperatif tersebut dinilai sangat optimis, apakah Provinsi Sumatera Barat mempunyai skema dalam mencapai tujuan tersebut?
5. Bagaimana mensinergikan hasil pencapaian RPJPD periode yang lalu dengan dokumen RPJPD yang disusun saat ini, untuk yang belum tuntas/belum tercapai bagaimana menindaklanjutinya?

3. Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pasal 4 ayat 3 yang meyatakan bahwa BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang modalnya dimiliki oleh satu daerah dan terbagi atas saham. Sedangkan Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham seluruhnya, atau minimal 51% saham dimiliki oleh satu daerah. Maka terkait dengan JAMKRIDA sebagai BUMD yang modalnya terdiri dari saham Pemerintah Sumatera Barat maka perlu ditambahkan nama PT. JAMKRIDA menjadi PT. JAMKRIDA (PERSERODA). Begitu juga dengan Upaya perubahan jumlah modal dasar dari Rp. 100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah) menjadi Rp. 357.619.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Milyar Rupiah) perlu dilakukan agar asset berupa bangunan senilai Rp. 10.804.804.000 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Empat Juta Delapan Ratus empat rupiah), bisa dicatat sebagai penyertaan modal sesuai Peraturan Pemerintah 54 tahun 2017.

Dalam hal ini, prinsipnya Fraksi PKS secara umum memandang perubahan Nama dan Perubahan jumlah modal dasar BUMD perlu dilakukan, karena amanah peraturan dan perundang-undangan. Akan tetapi

Dipindai dengan CamScanner

dalam pandangan umum ini Fraksi PKS memberikan beberapa harapan terkait BUMD JAMKRIDA Sumatera Barat.

1. Sesuai dengan tujuan didirikannya BUMD ini adalah untuk memberikan support jaminan kepada UMKM dan pengusaha Kecil, maka penting dipastikan bahwa keberadaan JAMKRIDA ini terasa bagi pedagang kecil dan UMKM. Jangan sampai hal ini terabaikan.
2. Selain itu BUMD JAMKRIDA juga dituntut menghasilkan profit yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan asli Daerah. Maka manajemen JAMKRIDA dituntut agar disatu sisi berpihak kepada UMKM, disisi lain juga bisa menguntungkan dari segi bisnis. Maka pemilihan objek yang akan menjadi jaminan JAMKRIDA perlu dilakukan dengan selektif
3. Untuk menjamin keberlangsungan Bisnis JAMKRIDA dan mencapai tujuan memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan jaminan Kredit perbankan, maka program pemberdayaan UMKM yang menjadi objek jaminan JAMKRIDA perlu dilakukan dengan baik dan bersinergi dengan OPD terkait pada Pemerintah Daerah di Sumatera Barat.

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami tanggapi dari Nota Rancangan 3 Ranperda diatas. Besar harapan kami kiranya penjelasan dari Saudara Gubernur nantinya dapat membantu kami dalam proses pembahasan selanjutnya, harapan kami bisa berjalan dengan baik dan sukses, sesuai harapan serta mencapai sasaran.

Wabillahitaufik wal hidayah, Wassalamualaikum, wr.wb.

Padang, 10 Juni 2024 M
3 Zulhijjah 1445 H
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(Fraksi PKS)
DPRD Sumatera Barat

Juru Bicara

H.Mochklasin,S.Si

Ketua **Sekretaris**

FRAKSI PKS • DPRD PROV. SUMATERA BARAT • PKS

Drs.H.Nurfirman Wansyah, MM,Apt. **Muhamad Ridwan, S.IP**

Dipindai dengan CamScanner

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP

RANPERDA PERTANGGUNG JAWABAN APBD
TAHUN 2023

Disampaikan Dalam Rapat Paripurna

Dalam Rangka

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi

Senin , 10 Juni 2024

Dipindai dengan CamScanner

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yth. Gubernur Sumatera Barat

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Dilingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Rekan Rekan wartawan, undangan dan hadirin yang berbahagia

Pertama dan utama sekali marilah sama-sama panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, pada pagi hari ini kita kembali dapat hadir pada Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan umum Fraksi terhadap :

RANPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2023.

Sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, junjungan umat dan dan suri tauladan bagi kita dengan Al Qur'an dan Hadist yang ditinggalkan sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankan kami **Fraksi Partai Demokrat**, menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan telah memberikan kesempatan untuk membacakan Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna yang terhormat ini. Semoga Allah akan memberikan Rahmat dan Hidayahnya Aamiin

... Aamiin Ya Rabbal Allamin.

Dipindai dengan CamScanner

Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2023, pada dasarnya merupakan wujud kristalisasi aspirasi daerah, yang disusun dan diputuskan bersama antara kepala daerah dengan DPRD yang dilakukan secara transparan.

Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014, pada pasal 320 ayat (1) yang berbunyi, "Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berkahir."

Beberapa hari yang lalu tepatnya selasa tanggal 3 juni 2024 sesuai jadwal Bamus, Gubernur telah menyampaikan Nota Pengantar tentang Ranperda Pertanggung Jawaban disidang Paripurna sebelum dilakukan pembahasan oleh komisi komisi dan badan anggaran, Fraksi terlebih dahulu menyampaikan pandangan umum nya.

Pada kesempatan ini kami Fraksi Partai Demokrat, dengan membaca Ranperda yang diberikan dan begitu juga buku laporan hasil pemeriksaan BPK –RI, izinkan kami menyampaikan beberapa hal Sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah tahun 2023 yang di arahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pendapatan transfer dan lain-lain, pendapatan daerah yang sah yang ditetapkan Rp. 3.034.554.065.207.- realisasi hanya sebesar Rp. 2.764.774.801.212,68 (91,77%) yang terdiri dari PAD Rp. 2.463.434.564.594.- realisasi sebesar Rp. 2.236.722.695.545.- (90,80 %) pendapatan retribusi Rp. 22.691.509.656 realisasi Rp. 15.049.240.433,- (70,73%) pendapatan hasil pengelolalaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rencana Rp. 117.277.113.555.- Realisasi Rp. 117.084.599.941.- (99,84%) dan lain-lain PAD yang sah Rp. 431.150. 877.402.- Realisasi Rp. 414.918.255.293,68 (96, 24%) semua yang direncanakan tidak satupun yang dapat tercapai dan melampaui yang ditargetkan, sepuluh tahun terakhir, tahun 2023 inilah

Dipindai dengan CamScanner

baru terjadi, mengapa dan disebabkan oleh apa yang direncanakan jangan melebihi untuk mencapai saja tidak ada satupun, minta dijelaskan, sementara pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan Rp.3.398.660.587.500.- Realisasi sebesar Rp.- 3.437.048.050.139 surplus Rp. 38.387.462.639.- (101,13%) sedangkan untuk pendapatan transfer antar daerah terjadi kurang yang direncanakan Rp. 27.932.220.000,- Realisasi Rp. 27.713.670.000,- (99,22%) . untuk lain-lain pendapatan yang sah juga tidak dapat dicapai, rencana Rp. 15.188.117.500.- Realisasi Rp. 14.341. 916.500,- kekurangan Rp. 846.202.000,- (99,43%). Sekali lagi mohon diberikan kejelasanya.

2. Belanja operasi dari total keseluruhan yang direncanakan sebesar Rp. 2.345.889.275.562,- Realisasi sebesar Rp. 2.195.331.447.151,- boleh dikatakan setiap tahun selalu besar sisanya tidak ada yang dibawah 5% untuk tahun 2023 bersisa 6,42% angka yang cukup besar Rp. 150.557.828.411,- jika dilihat rincianya ternyata tersisa yang besar ada pada belanja gaji dan tunjangan ASN bersisa Rp.87.838 .217.700.,-hal ini setiap tahun selalu terjadi, apakah Pemprov tidak punya data pegawai yang akurat, seharusnya sisa anggaran ini bisa diperkecil jika alasan ada yang pensiun atau pindah atau bertambah, tentu dinas yang menangani sudah dapat memprediksi atau memperhitungkannya. Minta dijelaskan dan apakah tahun 2024 akan terjadi lagi.

Dipindai dengan CamScanner

3. Tentang Belanja Modal anggaran yang sisediakan sebesar Rp.1.065.481.244.507, Realisasi sebesar Rp.991.975.692.930, (93,10 %). Ini cukup baik, akan tetapi pada belanja gedung dan bangunan bersisa sebesar Rp. 36.107.528.704,48, hanya Terealisasikan 89,92 % dimana ini bukanlah Silpa tender akan tetapi ada 3 pekerjaan gedung yang tidak selesai 100% mengapa dan apa sebabnya ini terjadi, yang pada gilirinnya bangunan tersebut tidak dapat dimanfaatkan, Mohon diberikan penjelasan.

4. Dinas lingkungan hidup mendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp. 26.667.278.817, Realisasi Rp.25.458.588.232, (95,42%) dan rencana untuk pendapatan direncanakan Rp.4.281.250.000,- Terealisasi Rp.3.499.040.200 (81,73%). Mengapa selalu tidak bisa tercapai yang telah direncanakan dan kemudian hasil pemeriksaan BPK RI, ini pun menjadi perhatian khusus terhadap retribusi jasa pengelolaan limbah B3. Terjadi kekurangan penerimaan sebesar Rp. 711.344.000, dimana dari catatan BPK RI Dinas Lingkungan Hidup menargetkan penerima retribusi pemakaian Laboratorium sebesar Rp. 2.581.250.000, realisasi hanya sebesar, Rp.1.561.257.400, diantaranya merupakan dari jasa pengelolaan limbah B3 di Incinerator air dingin sebesar Rp.1.447.537.400, dari target Rp.2.516.250.000, atau sama dengan 57,53%. Dimana dulunya oleh kepala dinasnya menyampaikan bahwa jika Incinerator ini akan bisa mendapatkan PAD hampir ke Rp. 11 Milyar lebih, ditahun 2023 dari hasil pemeriksaan BPK RI terdapat juga potensi kekurangan penerimaan atas Retribusi pengelolaan limbah B3 sebesar Rp. 711.344.000, ini kan angka yang cukup besar. Mengapa bisa terjadi mohon diberikan penjelasan.

Dipindai dengan CamScanner

5. Standar Harga Satuan Barang (SHSB) telah ada, dan PEMPROV telah punya SIPEDAL, namun dari hasil pemeriksaan BPK RI terdapat pemborosan atas pembelian yang melebihi standar harga satuan barang, pembelian telah melalui e - katalog lokal, ini terjadi di RSAM, RSJ Prof HB Saanin, RSUD Pariaman dan masih banyak lagi, mengapa hal ini bisa terjadi, ini jelas ketidak cermat dalam menyusun dan mendokumentasikan Referensi dan Negosiasi harga dengan tidak memperhatikan SHSB, bisa dikatakan pengendalian dan pengawasan dilingkungan SATKER lemah dan kedepannya agar lebih efisien.

6. Hasil Pemeriksaan secara uji petik oleh BPK terhadap belanja jasa konsultansi pengawasan pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Peternakan dan Dinas Perkebunan. Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Banyak ditemukan ketidak sesuaian kehadiran pengawas sebesar Rp. 166.332.842, ini angka cukup besar begitu juga biaya langsung personel dengan waktu penugasan tumpang tindih sebesar Rp. 85.918.846,94,- akibat dari hal tersebut berisiko tidak tercapainya mutu hasil pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan yang tidak dikerjakan oleh tenaga ahli yang sesuai, kami berpendapat hal ini sangat banyak dan sering terjadi, kami Fraksi Partai Demokrat mendorong PEMPROV melalui APIP harus cermat dan teliti lagi kedepannya agar tidak berulang.

Dipindai dengan CamScanner

7. Pada pekerjaan fisik dilingkungan PemProv setiap tahun selalu terjadi pekerjaan putus kontrak dengan bermacam macam permasalahan, ada pula disatu pekerjaan yang tidak tuntas, tiap tahun putus kontrak, apanya yang salah lagi, apakah SDM di dinas yang tidak memadai atau bagaimana seharusnya. Frekuensinya berkurang, tapi ternyata tidak. kami Fraksi Partai Demokrat berpendapat bisa jadi Pokja ULP tidak Profesional, kurang teliti dalam menetapkan pemenang, konsultan pengawas lalai dalam melaksanakan tugasnya begitu pula si penyedia jasa tidak punya kemampuan, jika ini terjadi harusnya penyedia jasa dikenakan sanksi Daftar Hitam untuk pembelajaran.
8. Aset tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 hasil dari Audited di tahun 2023 sebesar Rp.9.554.409.391.954. diantaranya berbenntuk tanah sebesar Rp.2.309.015.698.531,82. Bagaimana terhadap aset tanah tersebut sertifikatnya apa sudah semuanya bersertifikat atas nama PemPROV, karena hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2012 dinyatakan sangat banyak tanah-tanah tersebut belum bersertifikat. Mohon penjelasannya.

9. Terhadap hasil pemantauan tidak lanjut pemeriksaan sejak tahun 2004 s/d tahun 2022. Temuan pemeriksaan 423 rekomondasi BPK RI sejumlah 1.105, ternyata baru ditindak lanjuti yang sesuai dengan rekomondasi sejumlah 839, belum sesuai dan masih dalam proses 264, masih juga terdapat 2 belum ditindak lanjuti yang belum ditindak lanjuti dari data ternyata tahun 2005 dan tahun 2015, mengapa Inspektorat belum juga bisa menyelesaikannya, seharusnya untuk yang belum ditindak lanjuti ini sudah ada kejelasannya begitu pula yang belum sesuai dan masih proses, tindak lanjut di tahun 2022 (51), tahun 2021 (28), tahun 2020 (34), tahun 2019 (41) sudah berkurang. Apa masalah dan kendala terhadap proses tindak lanjut tersebut, mohon penjelasanya.

Dipindai dengan CamScanner

10. Kami minta penjelasan terhadap pembangunan pabrik yang di Pasaman, sepengetahuan kami ditahun 2021 pembahasan APBD tahun 2022, kegiatan tersebut dibatalkan dan pada pembahasan KUA/PPAS tahun 2023 sepengetahuan kami juga tidak ada, begitu pula pada RAPBD tahun 2023, mengapa bisa muncul saja pembangunan itu di dinas BMCKTR dan ternyata kegiatan tersebut tidak pula selesai, mohon penjelasan anggaran yang tersedia Rp.49.072.856.910,. terealisasi sebesar Rp.35.426.755.643, (72,19%) pekerjaan tidak selesai 100%.

Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, hadirin dan hadirat yang Kami Hormati ;

Demikianlah beberapa hal Pandangan, Catatan dan Saran serta Penegasan dari Pandangan Umum **Fraksi Partai Demokrat** terhadap :

RANPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2023.

Atas perhatian dan jawaban atau penjelasan Gubernur yang akan disampaikan nanti tentu akan jadi bahan dalam pembahasan selanjutnya.

Terima Kasih,

Hormat kami,

Dipindai dengan CamScanner

Padang, 10 , Juni 2024

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,	Sekretaris,
ALI TANJUNG	**Hj. A I D A, SH**

Wabillahi Taufik Wall Hidayah,

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penasehat	: 1. H. Suwirpen Suib. S.Sos
Ketua	: 2. Ali Tanjung
Wakil Ketua	: 3. Suharjono. SE
Sekretaris	: 4. Hj. Aida. SH
Bendahara	: 5. Jefri Masrul. SE
Anggota	: 6. H. M. Nurnas, ST
	7. Ir.H.Arkadius.Dt. Intan Bano. MM. MBA
	8. H. Ismet Amzis. SH
	9 .H. Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa. MM

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
JL.KHATIB SULAIMAN NO.87 (0751) 7057591-7057592-7057593 FAX (0751)59238 PADANG

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP

1. PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023
2. RANPERDA TENTANG RPJPD TAHUN 2025-2045
3. RANPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DISAMPAIKAN OLEH : H. DASWANTO, SE
TANGGAL : 10 JUNI 2024

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

- Yang kami hormati Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yang kami hormati ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Yang kami Hormati Saudara Sekretaris Dewan, beserta seluruh jajaran
- Yang kami Hormati saudara pimpinan lembaga, BUMN, BUMD, Tenaga Ahli DPRD, partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pemuda, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, ibu-ibu pengurus tim penggerak PKK, Bundo kanduang, pengurus organisasi wanita, beserta tokoh-tokoh masyarakat.
- Yang kami hormati Tamu undangan, rekan-rekan media pers serta segenap hadirin yang berbahagia

Dipindai dengan CamScanner

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan berbagai karunia dan kenikmatan kepada kita, sehingga saat ini kita dapat bersama-sama menghadiri dan melaksanakan sidang paripurna ini dalam keadaan beriman, sehat jasmani dan rohani.

Shalawat dan salam kita doakan, semoga selalu tercurah kepada Sang Nabi agung, Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi PAN terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 ini.

Saudara Gubernur, Hadirin sidang dewan yang kami hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, fraksi PAN menyampaikan terimakasih kepada Yth. Sdr. Gubernur dan segenap Jajaran Eksekutif Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah menyusun dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 ini. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 ini tentunya harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberlanjutan rencana pembangunan Sumatera Barat yang telah dituangkan dalam RPDPJ dan untuk jangka pendeknya akan menjadi anggaran yang beradaptasi secara efektif dengan kebutuhan saat temporer. Komisi-komisi perlu untuk melalukan pembahasan secara cermat dan kritis ini berkorelasi positif terhadap pencapaian-capaian kinerja pemerintah provinsi Sumatera barat yang lebih berkualitas.

Dipindai dengan CamScanner

Sidang dewan yang berbahagia...

Tahun 2023 sebenarnya adalah tahun dalam merealisasikan pencapaian target-target dan indikator yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan visi-misi kepala daerah kami ingin mendapat penjelasan tentang pencapaian terhadap indikator-indikator kinerja anggaran.

Lebih spesifik kami minta penjelasan lagi tentang target kontribusi pertumbuhan sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2023 terhadap inflasi yang masih tinggi .Hal ini menjadi penting bagi fraksi PAN, karena pertanian merupakan sektor yang paling besar menampung kehidupan masyarakat yang oleh karena sektor ini tentunya mesti menjadi perhatian utama. Mohon penjelasan

Rapat Dewan Yang Terormat,

Fraksi PAN kembali menegaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah berkewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu SKPD dan antar SKPD, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD serta sinkronisasi program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan. Kami minta penjelasan, untuk pertanggung jawaban tahun 2023, seperti apa hal ini diwujudkan, terutama dalam hal isu-isu strategis, seperti IPM, penanggulangan kemiskinan, pengangguran, kesenjangan wilayah, lingkungan hidup, infrastruktur dan ketahanan pangan. Seperti apa hal ini dikelola secara afektif dan afisien dalam pencapaian target-targetnya dan melibatkan semua SKPD terkait secara terpadu? Mohon penjelasan.

Dipindai dengan CamScanner

ASPEK PENDAPATAN DAERAH

NO.REK	URAIAN	ANGGARAN
4	**PENDAPATAN**	**6.476.334.990.207,00**
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.034.554.065.207,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.426.592.807,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.188.117.500,00
5	**BELANJA**	**6.745.614.683.086,00**
5.1	BELANJA OPERASI	4.729.827.769.310,00
5.2	BELANJA MODAL	1.065.481.244.507,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.314.904.651,00
5.4	BELANJA TRANSFER	944.990.764.618,00
	SURPLUS (DEFISIT)	**(269.279.692.879,00)**
6	**PEMBIAYAAN**	**269.279.692.879,00**
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	289.279.692.879,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**

Pada RAPBDP tahun anggaran 2023, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar **Rp. 6.476.334.990.207,00.-**yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan/ transfer serta lain-lain pendapatan yang sah.

Salah satu hal yang harus dicermati secara seksama adalah masalah kenaikan atau penurunan proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 yang sangat kisarannya tidaklah jauh kecil. Begitu juga jika dilihat dari aspek pendapatan asli daerah (PAD), hanya berkisar pada persentase yang tidak jauh berbeda dari waktu kewaktu. Oleh karena itu, atas kondisi ini, fraksi PAN merekomendasikan pada saat pembahasan di komisi-komisi, khususnya komisi yang membidangi keuangan,perlu ada pencermatan dan pengkritikan, sehingga ditemukan informasi akurat tentang potensi dan proyeksi pendapatan.

Dipindai dengan CamScanner

1. Mengoptimalkan kinerja system administrasi manunggal satu atap (SAMSAT)
2. Mengoptimalkan pelaksaan pelayanan Retribusi Jasa Umum,Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu pada seluruh OPD Dinas, Instansi pengelola Pelayanan retribusi.

Pada tahun 2023,pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp 6.476.334.990.207,00 sampai akhir tahun anggaran terealisir sebesar Rp 6.263.878.436.851,68 atau sebesar 96,76% kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp 212.456.553.355,32, mohon penjelasan

Rapat dewan yang berbahagia,

Kami juga meminta penjelasan strategi pemerintah daerah dalam meraup pendapatan pada Rumah Sakit yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sumatera barat yang hingga kini masih terkendala di banyak hal, baik administrasi maupun fasilitas.Bagaimana solusi cepat yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.Disamping itu, kami juga meminta penjelasan tentang pendapatan jasa usaha dinas lingkungan hidup dalam hal pengelolaan limbah B3 rumah sakit.

ASPEK BELANJA

Pada tahun anggaran 2023, Belanja Daerah dalam Rancangan APBDP diproyeksikan sebesar Rp.6.745.614.683.086,00 dan bila dibandingkan dengan alokasi Belanja Daerah Tahun 2023 awal sebesar Rp 6.204.281.123.951,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp 345.907.920.556,00 atau naik sebesar 5,58%. Dalam kaitannya dengan belanja daerah ini, fraksi PAN memandang dalam penyusunan rancangan RAPBD yang paling penting adalah ***alasan penetapan*** alokasi dan distribusi anggaran setiap SKPD. Dalam paparan Nota Keuangan Rancangan RAPBD 2023, indicator kinerja masih bersifat makro, namun tidak menjelaskan dan menunjukkan secara spesifik dan detail kinerja per SKPD jika dihubungkan dengan capaian-capaian kinerja utama pembangunan. Karena itu, Data kinerja per SKPD sangat penting dan

Dipindai dengan CamScanner

dibutuhkan untuk melihat sejauh mana kinerja program dan anggaran tersebut linier dengan keberhasilan indicator kinerja makrososial-ekonomi dan menjadi salah satu pedoman untuk penetapan program tahun berikutnya. Sekaitan dengan ini kami ***Mohon penjelasan.***

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Izinkan pula pada kesempataninikami meminta penjelasan kebijkan belanja untuk percepatanmencapai target-target visi dan misi kepala daerah yang sudah dijabarkan dalam RPJMD. Terutama dalam hal pencapaian target-target di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pertanian dan ketahanan pangan. Lebih dalam kami ingin mendapat gambaran tentang langka-langkah pemerintah daerah untuk mencapai target-target angka partisipasi murni (APM) sekolah, peningkatan indeks Angka Harapan Hidup (AHH) yang lebih baik di tahun 2023 ini, **Mohon penjelasan**...

Rapat dewan yang berbahagia....

Demikianlah ***Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Nota Penjelasan Gubernur Atas Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023*** ini. Akhirnya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan Rahmat, Barokah dan Ridhonya dalam setiap langkah perjuangan kita untuk membangun Sumatera Barat lebih baik.

WallahulMuwafiqilaaAqwaamithThoriq
Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

Padang, 10 Juni 2024

FRAKSI PAN DPRD SUMATERA BARAT

MAHAYATUL, SE, MSi.	**H. DASWANTO, SE**
KETUA	**SEKRETARIS**

Dipindai dengan CamScanner

H. INDRA DT RAJO LELO, SH, MM	:	PENASEHAT FRAKSI
MUHAYATUL, SE,M.Si	:	KETUA FRAKSI
H. MAIGUS NASIR,S.Pd	:	WAKIL KETUA FRAKSI
H. DASWANTO, SE	:	SEKRETARIS FRAKSI
H. DODY DELVY,SE	:	BENDAHARA FRAKSI
H. MUZLI M.NUR,S.PD	:	ANGGOTA FRAKSI
H. BUKHARI DT TUO, SE	:	ANGGOTA FRAKSI
H. AHMAD RIUS, SH	:	ANGGOTA FRAKSI
Hj. ARTATI, SH,MH	:	ANGGOTA FRAKSI
MUHAMMAD IKHBAL, SE	:	ANGGOTA FRAKSI

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 – 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

1. **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGARAN 2023**
2. **RANPERDA TENTANG RPJPD TAHUN 2025-2045**
3. **RANPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH**

DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA

Senin, 10 JUNI 2024

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang kami hormati :

Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Srd.Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan Kepala Biro dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran, rekan-rekan wartawan, undangan dan hadirin yang kami muliakan.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia Nya kepada kita semua sehingga dapat hadir pada kesempatan ini, untuk melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Gubernur Sumatera Barat tentang :

1. Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Ranperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045.
3. Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 – 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

Shalawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini, aamiin Ya Rabbal Alamin.

Sdr. Gubernur ,Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya kami menyampakan terima kasih kepada Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat diruangan rapat yang terhormat ini.

Terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai juru bicara untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat. Semoga amanah yang diberikan kepada saya ini dapat saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

A. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Angaran 2023

Sdr. Gubernur , Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati

Fraksi Partai Golkar setelah mencermati Nota Pengantar Gubernur terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, maka kami dari Fraksi Partai Golkar akan menyampaikan saran, kritikan dan pertanyaan, sebagai berikut :

A. Bahwa perioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera barat tahun 2023 diperioritaskan kepada 7 (tujuh) prioritas pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Sarak, Sarak basandi kitabulaah (ABS-SBK)
3. Meningkatkan nilai tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil /menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Dipindai dengan CamScanner

7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Karena tujuh perioritas pembangunan tersebut merupakan fokus pembangunan pada tahun 2023 , maka kami dari Fraksi Partai Golkar menanyakan sudah sampai dimana capaian kinerjanya dari masing-masing perioritas pembangunan tersebut kalau kita sandingkan dengan target indikator kinerja yang ada dalam RPJMD tahun 2021-2026.

B. Terhadap perioritas pertama yaitu meningkatkan kualitas SDM yang sehat, berpengetahuan , terampil dan berdaya saing.
Ada yang perlu kami pertanyakan kepada Sdr. Gubernur. Kalau kita lihat kondisi saat ini dimana rata-rata lama bersekolah di Provinsi Sumatera Barat baru 9,2 tahun , ini artinya rata-rata orang Sumatera Barat pendidikannya baru tamat SMP dan prevalensi stunting masih berkisar 25,2 %, Total Fertility Rate (TFR) cukup tinggi yaitu 2,7 , artinya dengan TFR yang cukup tinggi ini akan berisiko kepada tingginya angka kematian bayi dan ibu hamil/melahirkan, tingkat pengangguran masih cukup tinggi, pemakai narkoba dari tahun ke tahun terus meningkat di Sumatera Barat, LGBT sudah marak pula di Sumatera Barat. Pertanyaannya adalah , dari kondisi ril yang kami sebutkan tadi apakah kualitas SDM kita di Sumatera Barat sudah meningkat dan apa indikator dari peningkatan tersebut.

C. Terhadap Perioritas pembangunan kedua yaitu Meningkatkan tata kehidupan Sosial kemasyarakatan berdasarkan Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah (ABS- SBK). Terhadap falsafah ABS-SBK ini apa alat ukurnya , apakah pada zaman sekarang ini di Sumatera Barat adat nya masih basandikan kepada sarak atau adat sudah jalan sendiri dan sarak sudah jalan sendiri. Kami dari Fraksi Partai Golkar meminta kepada Sdr. Gubernur untuk dapat menjelaskan hal tersebut.

D. Terhadap perioritas ketiga yaitu Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan , dan perikanan.
Terkait dengan produktivitas pertanian, melihat kondisi kekinian terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat boleh dikatakan 20 tahun kebelakang ini tidak ada lagi melakukan cetak sawah baru, dilain pihak malah terjadi setiap tahunnya alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan, sekolah, pabrik dan lain-lain. Dan dari sisi lainnya malah sawah masyarakat sering diserang hama ditambah lagi cuaca sekarang ini tidak menentu dan malah banyak sawah masyarakat yang sudah tertimbun oleh galodo.

Dipindai dengan CamScanner

Dari kondisi tersebut bagaimana dengan peningkatan produktivitas padi di Sumatera Barat, apakah meningkat setiap tahunnya atau mengalami penurunan setiap tahunnya. Dan berapa penyusutan areal persawahan selama lima tahun kebelakang ini. Terhadap kondisi kekinian tersebut apa solusinya yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian (padi sawah).

E. Terhadap Pendapatan Daerah

Yang akan kami pertanyakan terhadap Pendapatan Daerah ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena PAD ini merupakan indikator kinerja utama daerah. Realisasi PAD adalah 91,77 % dari target Rp.3.034.554.065.207,- . Kalau kita telusuri lebih jauh ternyata yang rendah pencapaiannya yaitu pajak daerah (terealisasi 90,80 %) dan retribusi daerah (terealisasi 70,73 %). Kalau kita lihat ketahun-tahun sebelumnya khusus untuk pajak daerah selalu pencapaiannya diatas seratus persen dan untuk retribusi daerah memang setiap tahunnya selalu realisasinya rendah.

Yang jadi pertanyaan bagi Fraksi Partai Golkar adalah kenapa tahun anggaran 2023 ini target pajak daerah tidak mencapai 100 %, dan juga realisasi retribusi daerah kenapa sangat rendah sekali pencapaiannya setiap tahun, apakah Badan Pendapatan Daerah tidak mempunyai data base yang valid dalam menyusun perencanaan PAD khususnya untuk target retribusi daerah.

F. Bagi SKPD yang mencapai seratus persen atau lebih pencapaian PADnya dari target yang diberikan kami dari Fraksi Partai Golkar menyarankan kepada Sdr. Gubernur untuk diberikan Penghargaan dan bagi yang tidak mencapai target hendaknya diberikan sangsi apakah berupa pengurangan TPP bagi pengelola PAD tersebut.

G. Terhadap Belanja Daerah

Belanja Daerah terealisasi sebesar 94,18 % dari anggaran Rp.6.745.614.683.086,- . Rendahnya realisasi belanja ini kalau kita lihat dari realisasi per-jenis belanja adalah sebagai berikut :

1. Belanja pegawai terealisasi 93,58 % dari anggaran Rp.2.345.889.275.562.-
2. Belanja Barang dan Jasa terealisasi 93 % dari anggaran Rp.2.112.169.130.143,-
3. Belanja modal terealisasi 93,10 % dari anggaran Rp.1.065.481.244.507.-
4. Belanja Tidak Terduga terealisasi 0 % dari anggaran Rp.5.314.904.651,-
5. Belanja transfer terealisasi 99,59 % dari anggaran Rp.944.990.764.618,-

Dipindai dengan CamScanner

Dari realisasi belanja yang cukup rendah tersebut (94,18 %) , ada satu yang menggelitik kami dari Fraksi Partai Golkar yaitu belanja tidak terduga realisasinya hanya 0 %. Apakah selama tahun 2023 tersebut tidak ada terjadi bencana di Sumatera Barat? Mohon penjelasannya sehingga kami dapat memahami anggaran yang sudah dianggarkan prosesnya seperti apa?. Dan berikutnya apabila kita runut kebelakang yang hampir selalu bersisa setiap tahunnya sekitar 10 % itu adalah Belanja Pegawai. Dari kondisi ini maka Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa bazeting data tentang jumlah pegawai ini belumlah valid atau memang ada unsur kesengajaan untuk mencadangkan dana pada belanja pegawai tersebut, perlu ada penjelasan oleh Sdr. Gubernur.

H. SILPA

SILPA pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp.180.447.544.425,-, kalau dibandingkan dengan tahun 2022 sudah terjadi penurunan, dimana pada tahun 2022 SILPA adalah sebesar Rp.289.279.692.879,-

Adapun SKPD penyumbang SILPA terbanyak untuk tahun anggaran 2023 adalah : 1). Dinas Pendidikan (realisasi belanja 93,86 %), 2). Dinas Kesehatan (realisai belanja 92,95 %), 3). RSUD. Dr.Ahmad Muchtar Bukittinggi (realisasi belanja 88,84 %), 4). RSUD. M.Natsir Solok (realisai belanja 88,86 %), 5). RSUD Pariaman (realisasi belanja 92,11 %), 6). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (realisasi belanja 93,21 %), 7). Dinas Koperasi, UKM (realisasi belanja 81,13 %), 8). Dinas Kebudayaan (realisasi belanja 92,99 %), 9). Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura (realisasi belanja 89,03 %), 10). Sekretariat DPRD (realisasi belanja 91,97 %), 11). Badan Pendapatan Daerah (realisasi belanja 85,04 %), 12). Balitbang (realisasi belanja 92,30 %).

Terhadap 12 SKPD penyumbang SILPA terbanyak ini Fraksi Partai Golkar menyarankan Kepada Banggar DPRD dan TAPD untuk mempertimbangkan penambahan anggarannya pada perubahan APBD tahun aggaran 2024.

B. Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Sdr. Gubernur, Pimpinan DPRD Dan Hadirin yang berbahagia

Fraksi Partai Golkar setelah mencermati Nota Penjelasan Gubernur Terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, maka kami akan menyampaikan saran, kritikan dan pertanyaan, sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 – 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

1. Ada sesuatu hal yang baru dalam perencanaan untuk 20 tahun mendatang, dimana ada kata Imperatif „ yang artinya bersifat memerintah atau memberi komando malah lebih keras lagi dari perencanaan yang bersifat top down. Menurut kami dari Fraksi Partai Golkar tentu ada baiknya dan juga ada buruknya. Kalau baiknya bagi daerah yang selalu melenceng perencanaannya dari Perencanaan Pusat tentu akan terpaksa mengikuti perencanaan pusat. Pengalaman ini sudah pernah kita alami yaitu pada masa Orde Baru dahulu dimana yang kita kenal dengan GBHN dan Repelitanya. Daerah harus mengikuti apa yang telah digariskan dalam GBHN. Sedangkan jeleknya sistem imperatif ini adalah hilangnya hak otonomi daerah.
   Tetapi walaupun begitu kami dari Fraksi Partai Golkar menanyakan kepada Sdr. Gubernur apa kira-kira hambatannya bagi Provinsi Sumatera Barat karna kita dipaksa untuk melaksanakan perencanaan 20 tahun kedepan yang bersifat imperatif tersebut.

2. Kalau Kami cermati Nota Penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang RPJPD ini, lebih banyak bersifat normatif dimana lebih banyak menjelaskan aturan yang terkait dalam menyusun RPJPD tersebut belum nampak substansinya.
   Untuk itu kami dari Fraksi Partai Golkar menanyakan kepada Sdr. Gubernur kemana arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat untuk 20 tahun kedepan. Kalau kita lihat untuk Nasional dikatakan oleh Presiden RI bahwa pada tahun 2045 **menjadikan Indonesia Emas**. Bagaimana dengan kita di Provinsi Sumatera Barat , kemana Provinsi Sumatera Barat ini akan kita bawa untuk 20 tahun kedepan.

3. Terhadap RPJPN yang menyatakan imperatif kepada RPJPD bahwa visi harus mengandung kata maju dan berkelanjutan , kami dari Fraksi Partai Golkar sangat setuju sekali , karna selama ini ganti Kepala Daerah Visi, misi, sasaran dan program/ kegiatan kepala daerah yang lama tidak diteruskan oleh Kepala Daerah terpilih. Disisi lain terhadap sasaran visi tahun 2045 yang sudah ditentukan targetnya , bagaimana dengan kita di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data BPS angka kemiskinan kita masih tinggi, Income percapita kita masih rendah.
   Pertanyaannya bagaimana kita menyikapi penyusunan RPJPD karena adanya imperatif dari RPJPN.

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 – 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

C. Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah

Sdr. Gubernur, Pimpinan DPRD dan Hadirin Yang kami Hormati.

Fraksi Partai Golkar setelah mencermati Nota Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka Frasi Partai Golkar akan memberikan saran dan pertanyaan , sebagai berikut :

1. Perubahan Perda tentang Pendirian PT. Jamkrida adalah merupakan tuntutan dari beberapa aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dan aturan lainnya yang terkait dengan BUMD PT.Jamkrida tersebut. Sekaitan dengan hal tersebut diatas, maka Fraksi Partai Golkar ingin mengetahui dengan adanya perubahan perda ini apa keuntungannya bagi PT. Jamkrida dan apa keuntunganya bagi Koperasi dan UMKM yang akan mendapatkan penjaminan kredit atau hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan dari aturan yang lebih tinggi.

2. Dan dengan adanya perubahan Perda ini apakah Deviden yang diterima oleh Pemerintah Daerah selama ini juga akan berdampak untuk terjadinya peningkatan Deviden.

3. Berikutnya dengan adanya perubahan Perda ini, Fraksi Partai Golkar juga ingin tahu apakah juga akan mempengaruhi kepada Struktur organisasi pada PT. Jamkrida serta jumlah karyawan yang dibutuhkan.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar kami sampaikan, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan nantinya, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian.

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 – 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

Padang, 10 Juni 2024
Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat

Ketua	**Sekretaris**
(Zulkenedi Said, S.Sos, S.H., M.Si., M.M., M.H.,M.AP)	**(Dr.H.Hardinalis Kobal, S.E.,M.M)**

Juru Bicara

(Hardinalis Kobal)

1. H.Afrizal, S.H., M.H (Wakil Ketua)
2. Zarfi Deson, S.H (Bendahara)
3. Ir. H. Hendra Irwan Rahim, M.M (Anggota)
4. Drh. Nela Abdika Zamri, M.M., M.Si (Anggota)
5. Dra. Hj. Siti Izzati Aziz (Anggota)
6. H. Lazuardi Erman, S.H (Anggota)

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PPP – NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 – 7057592 – 7057593 Fax (0751) 59328 Padang 25133

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Pandangan Umum
Fraksi PPP - NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang
3 (Tiga) Ranperda :

1. **Ranperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023**
2. **Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045**
3. **Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat Senin, 10 Juni 2024

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yth. Gubernur Sumatera Barat

Yth. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Yth. Kepala Ombusdman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Lembaga Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Pimpinan Organisasi kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Para Wartawan dan Hadirin yang Berbahagia.

Dipindai dengan CamScanner

Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, ridha dan karunianya kepada kita, untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah tentang Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya shalawat beriring salam, tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna DPRD Sumbar di ruang yang terhormat ini.

Dan secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Fraksi PPP-NasDem yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai juru bicara, untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas.

Pimpinan Dewan, Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Fraksi PPP-NasDem mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah, pada hari Senin, 03 Juni 2024.

Dipindai dengan CamScanner

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan beberapa pandangan umum sehubungan dengan pembahasan 3 (tiga) Ranperda yang telah disampaikan oleh Gubernur dalam Rapat Paripurna yang lalu :

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang merupakan legitimasi yuridis formal yang dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 yang diberi opini ***"WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP).***

Atas opini WTP tersebut berarti Provinsi Sumatera Barat sudah 11 kali berturut-turut mendapatkan nya sejak tahun 2012-2023, maka kami dari Fraksi PPP-NasDem mengajak kita semua agar sama-sama bekerja dalam kerangka TIM, agar ke depan kita dapat mempertahankan, lebih-lebih bisa meningkatkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ini dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa catatan apapun.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan hakikat dari pelaksanaan proses demokrasi. Secara konseptual, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan bermuara kepada pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemberi mandat, baik kepada eksekutif maupun legislatif. Dengan itu dapat dianalisa untuk diketahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah, apakah ada kemajuan atau justru kemunduran selama satu tahun anggaran. Laporan pengelolaan keuangan daerah tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan keuangan/anggaran setiap tahunnya, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah (penganggaranya) semakin efektif, efisien dan dapat di kontrol oleh publik.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 ini, merupakan sebuah bentuk aplikasi sistem pertanggungjawaban anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan di

Dipindai dengan CamScanner

daerah. Selain sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap target serta pencapaian kinerja program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama 1(satu) Tahun Anggaran.

Dalam kesempatan yang baik ini Fraksi PPP-NasDem mengingatkan dan menegaskan kembali bahwa pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakan transparansi dan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya baik pada saat perencanaan, pengelolaan, pengawasan, maupun pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu , prinsip transparansi dan akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas publik pada dasarnya adalah perwujudan tanggungjawab kepada pemilik kedaulatan daerah sebagai pemegang saham pemerintah. Oleh karenanya seluruh lembaga penyelenggara pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, baik di tingkat *pengambil kebijakan* maupun *pelaksana kebijakan* daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya kepada rakyat dan kepada Allah SWT.

Pimpinan Dewan, Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Setelah mencermati dan melakukan analisa terhadap deskripsi materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, Fraksi PPP-NasDem memberikan beberapa pertanyaan dan catatan penting sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelengaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa-masa yang akan datang.

Adapun beberapa pertanyaan dan catatan dari Fraksi kami berkenaan dengan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1. Kami sepakat bahwa apa yang disampaikan Gubernur tersebut adalah wujud dari kristalisasi aspirasi daerah yang disusun dan diputuskan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD dan dilakukan secara transparan yang dilaksanakan oleh Gubernur bersama perangkatnya selama tahun 2023. Fraksi PPP-NasDem menyampaikan ucapan terima kasih yang sungguh-sungguh atas kerja keras yang telah dilakukan selama ini.
2. Khusus terhadap beberapa sektor pendapatan daerah, serta belanja daerah yang tidak memenuhi target, tentunya kita juga sepakat bahwa pada sektor ini perlu dievaluasi secara cermat dan tepat, serta benar-benar mematuhi saran BPK, supaya ke depan atau tahun 2024 dan seterusnya, kita tidak lagi mengulangi kesalahan dan kelemahan yang sama dan berulang-ulang. Keberadaan BUMD yang tidak menunjukkan perbaikan kinerja, hendaknya benar-benar menjadi fokus perhatian Gubernur di masa datang. Mohon tanggapannya.
3. Masyarakat Sumatera Barat identik dan terkenal dengan filosofi adat basandi sarak sarak basandi kitabullah. Jujur kita akui, bahwa filosofi itu belum menjadi pakaian yang riel di kalangan masyarakat berbagai tingkatan. Bahkan kenyataanya sebagian masyarakat sudah jauh dari ajaran syara' mangato adat mamakai. Hal itu terlihat dari makin maraknya dekadensi moral, perceraian, pemakaian dan pengedaran narkoba, pencurian merajalela. Kadangkala kita merasa bahwa filosofi adat itu hanya kita taati saat kita saling hantar kata saat kenduri atau acara-acara formal. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah serius memahami dan melaksanakannya atau kita melaksanakan sesuatu tidak dengan hati. Sementara kita sudah menempatkan prioritas pembangunan ABS-SBK itu pada prioritas yang kedua dari 7 prioritas. Mohon penjelasan Gubernur upaya apa saja yang sudah dan akan dilakukan untuk menegakkan kembali falsafah tersebut? Bagaimana usaha kita

Dipindai dengan CamScanner

mengisi batin anak didik di SMA, SMK atau sederajat di bawah kewenangan Gubernur itu, sehingga begitu mereka selesaikan SMA atau sederajat, mereka sudah mulai siap secara mental untuk menyandang kapasitas sebagai anak minang yang berbasis ABS-SBK itu. Pernyataan ini sengaja kembali kami sampaikan, mengingat makin hari makin meningkatnya bahaya narkoba, perceraian dan pencurian. Bahkan dalam lalu lintas peredaran narkoba itu juga terlibat oknum staf atau kawan kita. Masyarakat memang diam, tapi yakinlah mereka tahu kondisi itu dan mencibir kita dari belakang. Bagaimana gubernur mengelola kondisi seperti ini, tolong dijelaskan.

4. Beberapa waktu lalu, kami sudah menyampaikan surat secara tertulis dan Gubernur sudah menjelaskannya, tapi kembali kami sampaikan, menyangkut persoalan pukat harimau atau hamparan dasar, yang masih beroperasi di seputar Pasir Ganting nagari Pulau Rajo Kecamatan Air Pura, Air Haji dan Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti bahkan sampai ke Sumedang Ranah Pesisir. Pukat Harimau ini milik dari orang-orang bagak yang mungkin memiliki hubungan khusus dengan oknum petugas. Sehingga mereka ini masih leluasa di Kawasan ini. Sudah banyak jaring, alat penangkap ikan lainnya yang putus, porak poranda ditarik dan dicabik oleh pukat harimau ini. Pernah ditertibkan, tapi malangnya sampai hari ini mereka tetap beroperasi dan memperlihatkan bahwa mereka orang bagak. Apakah mereka ini lebih bagak dari Gubernur, sehingga tidak bisa ditertibkan. Mohon penjelasan dan perhatian Gubernur kembali bagaimana perkembangannya.
5. Demikian pula dengan persoalan terancamnya masyarakat Air Uba Pulau Rajo Kecamatan Airpura Pesisir Selatan, dari meluap dan makin dekatnya air laut ke rumah masyarakat. Dulu, laut itu berjarak satu kilometer dari rumah, sekarang sudah berjarak 7 sampai 10 meter. Kalau air pasang datang, maka mereka sudah hidup dalam laut. Kami juga

Dipindai dengan CamScanner

mohon penjelasan apakah mereka masih bisa berharap kepada kita untuk mendapatkan solusi yang mampu mengamankan kehidupan mereka.

6. Persoalan petani sawit swadaya, yang prosentasenya jauh lebih tinggi dari milik Perusahaan. Tapi mereka berada pada posisi yang relatif lemah. Mereka belum kita ayomi dari persaingan harga, tata Kelola pengolahan serta Kerjasama dengan pemilik pabrik kelapa sawit. Sekalipun kita berpijak kepada peraturan pemerintah pusat yang sama, tapi dalam penjabaran dan pelaksanaannya terasa sangat berbeda. PPP NasDem sangat berharap, kita dapat menyimak apa yang dilakukan Jambi dan Riau dalam mengelola petaninya. Kebijaan yang dilakukan mereka terasa sekali bahwa pemerintah itu hadir mengayomi kepentingan mereka. Nampaknya kita perlu mempelajari taktik, teknik dan cara mereka dalam melindungi petani swadayanya, potongan timbangan sampai 12% dan lain-lain tidak dijumpai lagi di Riau dan Jambi. Petani swadayanya sudah mereka kelompokkan sehingga mereka sudah setara dengan Patani mitra. Mohon penjelasan.
7. Penduduk Mentawai pada tahun 2023 berjumlah sebanyak 93.313 jiwa, berasal dari berbagai suku dan daerah, terutama daratan Sumbar. Pasti tinggi kebutuhannya terhadap layanan Fasilitas Kesehatan termasuk ambulance laut. Di Tua Pejat Mentawai, sampai tanggal 09 Juni 2024 lalu, belum memiliki Ambulance Laut, yang mampu melayani dan menangani masyarakat yang sakit atau kematian. Baik antar pulau dalam daerah Mentawai maupun antara Mentawai dengan Ibu Kota Provinsi Sumbar Kota Padang. Masyarakat harus menyewa antara 15 sampai 20 Juta rupiah untuk ini. Masyarakat belum atau tidak mampu untuk membayar yang semahal itu. menurut hemat kami keberadaan ambulance laut sangat dibutuhkan oleh masyrakat hal ini sejalan dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Fraksi PPP-NasDem Kembali mengingatkan bahwa

Dipindai dengan CamScanner

keberadaan ambulance laut sangat dibutuhkan oleh Masyarakat, apakah hal ini akan ditindaklajuti oleh Gubernur atau diabaikan saja, mohon penjelasannya.

8. Untuk lebih memperdalam laporan pertanggung jawaban ini, selanjutnya akan kita bahas bersama secara marathon dalam agenda yang akan ditetapkan Badan Musyawarah beberapa hari ke depan.

2. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045

Pengalaman kita dalam menghadapi bencana alam yang merata Sumatera Barat beberapa waktu lalu, rasanya cukup membuat kita makin sadar dan waspada. Masalah berkembangnya berbagai usaha kolam atau tambak udang atau ikan sepanjang Pantai, seperti depan Bandara Minangkabau dan sekitarnya, bukan tidak mungkin ini juga merupakan ancaman selanjutnya di masa depan, memicu bencana. Kondisi demikian juga bisa berpotensi memicu terjadinya krisis ekonomi Sumatera Barat. Karenanya, pemerintah provinsi Sumatera Barat perlu mengkaji ulang dan menerapkan perencanaan dengan teliti serta akurat.

Perencanaan strategis semakin penting, bahkan tidak dapat dihindari setelah berbagai perobahan terjadi. Oleh karena itu perencanaan strategis dapat disebut sebagai metode yang berkompleksitas dengan lingkungan yang sering kali erat kaitannya dengan berbagai kepentingan suatu organisasi.

Perencanaan strategis ini akan mampu merubah cara berfikir manajemen, mengalokasi dan merelokasikan berbagai sumber daya dan program yang sedang berlangsung. Demikian juga fleksibilitas dan indepedensi akan menjadi kata kunci untuk melaksanakan perencanaan strategis ini. Perencanaan strategis berkaitan dengan dampak masa depan dari keputusan strategis yang dibuat sekarang. Perencaan ini mencakup berbagai pilihan yang berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan.

Dipindai dengan CamScanner

Pada tahun 2024, sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentnag Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, mengamanatkan kepada seluruh Pemerintah Daerah baik Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dengan berpedoman kepada RPJPN Tahun 2025-2045, yang ditetapkan dengan masing-masing Peraturan Daerah dengan target waktu untuk Tingkat Provinsi telah diundangkan pada Minggu I Agustus 2024.

Pimpinan Dewan, Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Selanjutnya setelah kami menganalisa dan mempelajari Nota Pengantar Ranperda RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, maka kami Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1) Fraksi PPP-NasDem menyarankan Pemprov untuk melibatkan berbagai pihak yang relevan, termasuk seluruh perangkat daerah, tokoh masyarakat, organisasi profesi dan semua pemangku kepentingan agar dapat menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Tahun 2025-2045 yang mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.
2) Perencanaan pembangunan daerah tentunya adalah hal yang sangat penting karena membantu dalam mengelola sumber daya yang terbatas dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Perencanaan pembangunan daerah menjadi upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Dipindai dengan CamScanner

3) Fraksi PPP-NasDem memahami dan bersepakat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki arti penting dan bernilai strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJPD juga menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Visi-Misi pembangunan daerah.

4) Fraksi PPP-NasDem berpendapat bahwa program penanggulangan kemiskinan harus memiliki singkronisasi pada program ketenagakerjaan, karena penurunan tingkat kemiskinan dapat terjadi apabila daya serap tenaga kerja tinggi, daya serap tenaga kerja akan terjadi apabila tersedia lapangan kerja yang memadai. Lapangan kerja dapat tercipta apabila terjadi peningkatan investasi, ini memang sebuah tali temali yang saling berhubungan. Dalam pembahasan RPJPD ini sejauhmana singkronisasi program penanggulangan kemiskinan dapat terhubung dengan program ketenagakerjaan. Mohon penjelasan.

5) Fraksi PPP-NasDem menghimbau agar RPJPD hendaknya tetap memberikan penekanan kepada peningkatan infrastruktur seperti Jalan, PJU, Drainase, dan Irigasi. Mohon untuk di tindaklanjuti.

6) Pembangunan daerah yang dilaksanakan harus mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah, dan disingkronkan dengan Prioritas Nasional. Pendidikan merupakan urutan pertama dari sepuluh program prioritas nasional, dan ini harus dijadikan sebagai program daerah, terutama terkait dengan Peningkatan Kualitas Guru, pendidikan di daerah ini tidak akan berhasil jika kualitas dari gurunya tidak memadai. Berkaitan dengan hal ini Fraksi PPP-NasDem meminta penjelasan dari saudara langkah seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas guru yang ada saat ini khususnya guru SMA/SMK.

7) Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa program-program pembangunan yang telah tersusun ini harus segera diikuti dengan strategi dan langkah yang riil atau nyata sehingga bisa dievaluasi terhadap hasil

Dipindai dengan CamScanner

yang telah dicapai, sehingga RPJPD ini tidak hanya bersifat teoritik dan normatif saja, tetapi sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Hal ini penting karena masyarakat tidak membutuhkan retorika-retorika yang akhirnya akan menjadi janji-janji belaka.

8) Fraksi PPP-NasDem berharap, Gubernur mengevaluasi kembali izin tambak udang atau ikan di sepanjang Pantai Padang, Pariaman dan seterusnya sampai ke utara, apakah tambak itu telah berposisi sesuai dengan tata ruang peruntukannya, supaya tidak mengancam bandara dan Masyarakat secara keseluruhan. Tolong ditanggapi.

3. Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Penjaminan Kredit Daerah

BUMD merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang berperan penting dalam menjalankan, mengembangkan dan meningkatkan perekonomian daerah dan tentunya mendukung perekonomian nasional sacara umum. Keberadaan BUMD memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi daerah.

Perda tentang Perseroda ini, telah menjadi pembicaraan yang sangat inten dengan berbagi pihak, akan keberadaannya. Maka pengajuan dan inisiasi Ranperda ini menjadi sesuatu yang sangat strategis bagi keberadaan BUMD kita di masa depan. Fraksi PPP NasDem mengapresiasi gagasan ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pimpinan Dewan, Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Demikianlah Pandangan Umum dari Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap Ranperda Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023, Ranperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045 dan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah, yang rasanya perlu kami sampaikan dalam rapat peripurna ini, jika ada hal yang kurang berkenan di hati saudara sekalian, kami mohon maaf dan kepada Allah, kami mohon ampun.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

وَلسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Padang, 10 Juni 2024

Bakri Bakar
Juru Bicara

Fraksi PPP-NasDem
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Sawal, SH	**Irwan Afriadi**
Ketua	Sekretaris

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No.87 Telp. (0751)443391,7059325,7059328 Fax.(0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PDI PERJUANGAN DAN PKB
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

1. **PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**
2. **RANPERDA TENTANG RPJPD TAHUN 2025-2045**
3. **RANPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMIN KRIDIT DAERAH**

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Merdeka!!!

- **Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumatera Barat**
- **Yang terhormat Saudara Gubernur**
- **Yang terhotmat Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama**
- **Yang terhormat Sekretaris daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Dina/Badan/Biro lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,**
- **Yang terhormat Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, dan rekan-rekan media cetak serta eloktronik dan hadirin yang berbahagia**

Terimakasih kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat Paripurna ini atas waktu yang diberikan pada kami untuk membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan dan PKB terhadap tiga (3) Raperda tersebut di atas dan atas izin Pimpinan Rapat kami mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, atas ridho dan rahmat-Nya kita dapat memenuhi tugas kita dan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumatera Barat dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap

Dipindai dengan CamScanner

tiga (3) Ranperda di atas dalam keadaan sehat wal-afiat. Selanjutnya Shalawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kearwah nabi besar kita Muhammad SAW junjungan alam pembawa perubahan revormasi dan restorasi kehidupan manusia dari alam kegelapan menuju sinar kemajuaan - minazzulumati ilannur- sebagaimana yang kita rasakan hari ini, serta selalu kita dambakan safaatnya siang dan malam.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Sebagaimana dengan jadwal hari ini bahwa Fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ranperda diatas, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB dalam penyampaian pandangan umumnya akan lebih banyak bertanya dan meminta penjelasan pemerintah daerah atas pertanyaan tersebut sebagai bahan dalam pembahsan-pembahasan selanjutnya, sebagai berikut :

1. **Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023**

   Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014, pasal 320 ayat (1): Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, sekaitan dengan hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 berserta lampiran-lampirannya yang berguna sebagai bahan bahasan bagi Fraksi PDI Perjuangan dan PKB dalam menyusun Pandangan Umum Fraksi kami sebagai berikut:

   1) Dalam Nota Pengantar disampaikan ada tujuh (7) poin perioritas pembangunan daerah berdasarkan pada RKPD Tahun 2023 yang perlu menjadi perhatian kita bersama, Fraksi kami ingin mendapat penjelasan akan hal ini, langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap tujuh (7) poin tersebut pada tahun 2023, dan terkhusus pada poin enam (6) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB meminta penjelasan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat apakah poin 6 ini sudah dapat dirasakan oleh daerah yang berada diwilayah 3 T, mohon penjelasan.

   2) Di dalam Buku Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disampaikan bahwa masih ada satu sasaran dengan *kategori kinerja sangat rendah yaitu menurunnya prevalensi stunting*, pada

Dipindai dengan CamScanner

hal kita semua tahu bahwa persoalan stunting ini sangat mempengaruhi untuk mencapai SDM yang unggul menuju Indonesia Emas dan dapat dikatakan bahwa Sumatera Barat belum keluar dari tingginya prevalensi stunting, dimana ada informasi terhadap penyebab stunting bukan hanya dari gizi tetapi juga dari kualitas sumber air minum terutama di daerah 3T, mohon penjelasan.

3) Masih Dalam Buku Laporan Kinerja dibunyikan masih ada satuan pendidik yang belum terpenuhui Tenaga Pendidik dan Kependidikannya dari segi kualitas dan kuantitasnya, terhadap temuan ini Fraksi kami mengkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu menjadikan masyarakat mandani yang memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikian yang berkualitas, dari temuan ini Fraksi PDI Perjuangan dan PKB melihat bahwa capaian dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ini dari Pemerintah Darah Provinsi Sumatera Barat masih belum memenuhi target terutama bila kita bandingkan pada saat itu menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, apa lagi tahun ini sudah memasuki Pilkada serentak pada bulan November 2024 mendatang, dimana masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini akan berakhir, mohon penjelasan apa yang menjadi penyebabnya.

4) Dalam penilaian Indeks Pembangunan Kebudayaan kami melihat indikator yang menjadi dasar perhitungan IPK kurang relevan dengan objektivitas perkembangan kehidupan masyarakat saat ini dimana terdapat faktor kemajuan teknologi yang merubah pola pikir dan kebiasaan di masyarakat khususnya kaum milenial. Menurut Fraksi kami tantangannya bagaimana ABS SBK bisa terwujud dan bersinergi dengan perkembangan zaman. Selain itu Indeks Ketahanan Sosial Budaya di Sumatera Barat juga masih berada dibawah rata-rata Nasional yang artinya kinerja pemerintah daerah selama ini belum maksimal padahal anggaranya cukup besar yaitu senilai 178 Milyar. Karna itu menurut hemat kami dari Fraksi PDI Perjuangan dan PKB perlu adanya strategi dan kinerja yang lebih kongkrit kedepannya dalam pencapaian terwujudnya ABS SBK dan Pemajuan Kebudayaan di Sumatera Barat dengan mengikuti perkembangan teknologi digital, mohon penjelasan

5) Peningkatan Pendapatan Petani Pertanian Pangan merupakan salah satu indikator kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Barat, namun dari buku laporan kinerja Nilai Tukar Petani Pangan (NTP) masih dibawah 100 yang artinya deficit padahal petani pangan itu rata-rata Masyarakat tani

Dipindai dengan CamScanner

tradisional yang sangat berbeda dengan Perkebunan yaitu didominasi oleh Perusahaan yang sudah profesional. Mohon penjelassannya terkait NTP petani pangan yang belum tercapai target ini dan kami dari Fraksi PDI Perjuangan dan PKB sangat menekankan kepada Pemerintah Prov. Sumatera Barat dalam peningkatan pendapatan petani agar perlu dibentuk perda dan strategi khusus untuk pemajuan petani pangan khususnya.

6) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan Dimana Indikator Pendapatan Nelayan tahun 2023 belum tercapai target yang ditetapkan dan kami juga melihat tidak ada upaya yang kongkrit kedepan untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Sedangkan potensi nilai perikanan dari hasil nelayan di Sumatera Barat sangatlah besar karna Wilayah Sumatera Barat yang memiliki Pesisir Pantai. Saat ini banyak Masyarakat di wilayah pesisir Pantai yang mengeluh susahnya berlayar dengan berbagai macam kendala seperti kurangnya alat operasional. Seharusnya Pemerintah hadir dengan program dan bantuan yang efektif dan terukur untuk kelompok-kelompok nelayan. Oleh karena itu mohon penjelasannya terkait target yang tidak tercapai oleh pemerintah daerah dan bagaimana tindak lanjut kedepannya.

7) Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan di Sumatera Barat khususnya di Kab. Kep. Mentawai IKP nya masih sangat rendah dan masuk dalam kategori kelompok yang "SANGAT RENTAN", terhadap Kab. Kep. Mentawai ini Fraksi kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat kiranya memberikan laporan dari sisi pemerataan pembangunan dan partisipatif Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kap. Kep Mentawai.

8) Salah satu misi RPJMD Sumatera Barat yaitu "mewujudkan perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing". Dalam capaian indicator kinerja kontribusi sektor perdagangan dan sektor industry terhadap PDRB di Sumatera Barat masih sangatlah rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di pulau Sumatera dan masih rendah dari target Nasional serta mengalami penurunan dari tahun 2022 pada sektor industri. Kemudian laju pertumbuhan sektor perdagangan juga tidak mencapai target bahkan menurun dari tahun 2023. Selain itu kami dari Fraksi PDI Perjuangan dan PKB juga melihat perkembangan ekonomi digital di Sumatera Barat juga belum nampak sampai saat ini dimana masih rendahnya jumlah pelaku ekonomi digital dan juga rendahnya pelaku ***start-up*** di Sumatera Barat. Mohon penjelasannya

Dipindai dengan CamScanner

9) Mohon penjelasannya lebih lanjut terhadap pencapaian Entrepreneur Baru di tahun 2023 sebesar 109.903 apakah jumlah tersebut adalah penambahan Entrepreneur yang baru atau hanya data dari jumlah peserta program pembinaan ? jika datanya dari peserta program pembinaan menurut Fraksi kami yang ikut program pembinaan/pemberdayaan tidak bisa dikatakan entrepeuner, serta mohon penjelasannya juga terhadap pencapaian yang tidak sesuai target dan lebih rendah dari tahun 2022.

10) Salah satu misi dalam RPJMD yaitu "Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan" dengan tujuan terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Handal dan Merata. Dalam Indeks Kinerja Infrastruktur belum mencapai target dan lebih rendah dari tahun 2022 yang dimana didominasi oleh indikator kemantapan jalan yang pencapaiannya masih jauh dari target. Infrastruktur Jalan menurut kami merupakan pondasi penggerak pertumbuhan perekonomian dan IPM. Mohon penjelasannya.

11) Dalam hasil rapat Pansus yang lalu salah satunya yaitu penyelesaian pembangunan SMA 3 Sumatera Barat di Kab. Pasaman yang sampai saat ini belum 100% terealisasi, dan jika dicermati pada anggaran pendidikan terdapat 25 Milyar lebih sisa anggaran. Mohon penjelasannya terkait penyelesaian Pembangunan SMA 3 Sumatera Barat dan penjelasannya terkait sisa anggaran yang sangat besar tersebut.

12) Secara keseluruhan tentang APBD tahun 2023 Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menilai bahwa konsep penyusunan APBD masih didominasi berdasarkan pola copypaste dan dilanjutkan pembagian anggaran seperti konsep pembagian kue karena keterbatasan anggran, konsep progul yang merupakan penjabaran visi, misi kepala daerah menjadi bagian yang autputnya tidak sesuai harapan, untuk itu Fraksi kami menanyakan apakah konsep penyusunan APBD yang dilakukan oleh Pemerintah Provini Sumatera Barat masih relevan untuk kedepannya? Mohon penjelasan.

2. **Ranperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045**

Sebagaimana dalam Nota Penjelasan bahwa UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan untuk menyususn : 1) RPJPD untuk periode 20 tahun, 2) RPJMD untuk periode 5 tahun, 3) RKPD untuk periode 1 tahun, tentang RPJPD 2025-2045 sebagaimana dengan SEB Mendagri, dan Menteri PPN/Kepala BAPENAS RI No 600.1/176/SJ/dan No 1 Taun 2024 tentang penyelarasan *RPJPD 2025-2045 menegaskan agar dokumen RPKPD*

Dipindai dengan CamScanner

Provinsi dapat tersusun secara berkualitas dan impreatif selaras dengan RPJPN Tahun 2025-2045 yang memuat empat poin (4), sekaitan dengan hal ini izinkan Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan pandangan Umumnya sebagai berikut:

1) Salah satu dari empat poin diatas adalah Terjamin terciptanyaa dukungan perencanaan daerah tingkat Provinsi terhadap Pencapaian visi, sasaran visi, misi, arah pembangunan dan indicator utama pembangunan nasional, diharapkan RPJPD ini selain harus selaras dengan RPJPN tentu juga diharapkan adanya sustainable/berkelanjutan dari RPJPD sebelumnya, pertannyaan Fraksi kami bagaimana ini dapat terlaksana dengan baik terutama pada bulan November 2024 mendatang sudah memasuki Pilkada Serentak, mohon penjelasan.

2) Masih dalam nota penjelasan menyampaikan bahwa mekanisme perencanaan yang harus dilaksanakan yaitu harus tersusunnya rencana dokumen RPJPD yang berkuatis dan IMPERATIF yang selaras dengan RPJPN tahun 2025-2045, Kata IMPERATIF merupakan kata baru dan diulas perbedaannya dengan penyususnan RPJPD sebelumnya, mohon penjelasan apa perbedaan antara penyusunan yang terdahulu dengan yang sekarang termasuk impelmentasinya terhadap program-program/kegiatan-kegiatan.

3) Kondisi wilayah Sumatera Barat banyak kawasan rawan bencana alam seperti longsor dan air bandang yang kejadiannya dapat kita lihat beberapa waktu yang lalu dan juga berada pada zona megathrust dimana berpotensi terjadinya gempa besar, namun menurut Fraksi PDI Perjuangan dan PKB setelah membaca naskah akademik ataupun Rancangan Akhir RPJPD belum ada menggambarkan secara spesifik untuk pemetaan kawasan rawan bencana serta antisipasinya, dan pada zona megathust kami juga belum melihat tentang mitigasi bencana tersebut serta meningkatkan kegiatan mitigasi bencana untuk menyelamatkan masyarakat yang telah lama menetap didaerah tersebut, mohon penjelasan.

4) Provinsi Sumatera Barat adalah provinsi yang terdiri berbagai suku, agama, beragam adat istiadat, namun dalam Rancangan Akhir RPJPD Prov. Sumbar Tahun 2025-2045 pada posisi Agama dan Budaya masih memfokuskan untuk salah satu agama yang mayoritas, kita ketahui beberapa tahun yang lalu telah terjadi beberapa kasus terhadap persoalan ini yang membuat indeks demokrasi dalam kebebasan beragama rendah, mohon penjelasan apakah dalam RPJPD tahun 2025-2045 ini persoalan menjaga harmonisasi dalam masyarakat sudah di akomidir sehingga apa yang dicita-citakan "

Dipindai dengan CamScanner

Sumatera Barat, **Madani,** Maju, dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya dapat tercapai dengan baik.

3. **Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kridit Daerah**

Sebagaimana kita ketahui bahwa otonomi daerah memberikan peranan yang besar bagi BUMD dalam menopang pendapatan asli daerah (PAD) dan otonomi daerah mengharuskan adanya otonomi di sektor ekonomi, tidak hanya sektor politik, berdasarkan hal ini maka diperlukan landasan hukum yang tangguh yang dapat menjadi pijakan atau pedoman agar BUMD dapat berperan sebagai lembaga bisnis yang profesional, mandiri dan dapat berkiprah serta memenuhi tuntutan bisnis domestik dan global, salah satu BUMD yang ada di Sumatera Barat yang akan kita bahas pada saat ini adalah PT Jamkrida Sumbar yang telah memilik izin dari OJK No. Kep-62/D.05/2013 tanggal 26 Juli 2023 dan izin unit usaha Syariah dari OJK No Kep-54/NB.223/2017 tertanggal 18 Mei 2017. PT Jamkrida dibentuk untuk mendukung keberlangsungan kegiatan usaha koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menegah yang memerlukan akses dan kemudahan dalam permodalan dari lembaga penjamin kridit di daerah yang bergerak dalam bidang keuangan dan kegaitan usaha pook melakukan penjaminan, sekaitan dengan ini izinkanlah Fraksi kami menyampaikan pandangan umum sebagai berikut :

1) Sebagaimana disampaikan dalam naskah akademik bahwa tujuan pembentukan PT Jamkrida adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan mempelancar kegiatan ekonomi khususnya diperuntukan untuk UMKM dan Koperasi (Kridit Produktif), untuk itu Fraksi kami meminta penjelasan langkah-langkah apa saja yang akan di lakukan ditengah persaingan bisnis penjamin dengan milik BUMN dan Swasta

2) Sekaitan dengan poin satu (1) di atas, Fraksi kami meminta penjelasan seberapa jumlah modal dasar yang diperlukan oleh PT Jamkrida untuk dapat memenuhui pasal 5 Ranperda Perusahaan Terbatas Daerah Penjamin Kridit Daerah, karena menurut Fraksi kami dengan menaikan modal dasar menjadi sebesar RP 357.619.000.000.- ini akan menjadi beban kedepannya bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, walaupun UU PT mengizinkan untuk modal disetor 25 %, contoh terhadap modal Bank Nagari yang sampai saat ini tidak bisa dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, mohon penjelasan

3) Fraksi PDI Perjuangan dan PKB pada kesempat ini meminta kepada PT Jamkrida untuk menjelaskan target/sasaran yang efektif untuk dicapai berkaitan dengan kondisi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi yang kita cintai ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pimpinan, Anggota dan Segenap Hadirinn yang kami mulyakan

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas Fraksi PDI Perjuangan dan PKB mendukung Ranperda Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045, Ranperda tentang Perusaan Perseroan Terbatas Daerah Penjamin Kridit Daera untuk dilanjutkan pembahasannya ketingkat selanjuntnya, semoga dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Demikianlah Pendangan Umum Fraksi PDI Perjuangan dan PKB atas segala perhatian Rapat Dewan yang terhormat, kami ucapkan terimaksih.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 10 Juni 2024

PIMPINAN FRAKSI
PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Albert Hendra Lukman, SE
Ketua

Firdaus, S.H.I
Sekretaris

Leliarni,S.Pd,M.Si
Juru Bicara

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI GERINDRA
(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

GERINDRA

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP

Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir
DPRD Provinsi Sumatera Barat
Senin, 1 Juli 2024

Juru Bicara : Nurchalis, Dt. Bijo Dirajo, S.Pt

Assalamualaikum Wr. Wb
Yang terhormat

- Sdr. Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Sdr. Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Sdr. Pimpinan dan Anggota TAPD Provinsi Sumatera Barat
- Sdr. Sekretaris Daerah/Asisten/Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Sdr.Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Barat serta hadirin dan undangan yang kami muliakan

Peserta Rapat Kerja Pembahasan Akhir yang kami muliakan

Alhamdulilahirabbil a'lamin, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semua hari ini, pada Rapat Kerja Pembahasan Akhir DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Izinkanlah Kami Fraksi Partai Gerindra pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Rapat, atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Gerindra menyampaikan Pendapat Akhir terkait *RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2023.*

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 443391 - 7059325 - 7059328 Fax. (0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

Dipindai dengan CamScanner

Hadirin Undangan yang Berbahagia..

Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan akhir dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari KUA-PPAS, APBD, Perubahan APBD dan diakhiri dengan Pertenggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Sebagai akhir dari siklus pengelolaan keuangan daerah, maka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan sarana untuk mengevaluasi dari keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan daerah, untuk memastikan bahwa keuangan daerah telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan yang direncanakan, telah digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan sasaran yang akan dicapai serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada rapat Paripurna tanggal 3 Juni 2024 lalu, saudara Gubernur telah menyampaikan kepada DPRD Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 untuk dapat dibahas dan disepakati menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini, tentu tak sekedar penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai sebuah legalitas formil diterimanya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukan Kepala Daerah beserta perangkatnya saja.

Lebih dari itu, hasil pembahasan ini juga dapat mengukur sampai sejauhmana anggaran yang telah digunakan, dapat mewujudkan target kinerja pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta menemukan permasalahan, kelemahan serta dapat merumuskan upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Saudara Pimpinan, dan Hadirin yang Berbahagia..

Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 ini, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Di bagian awal ini, kami ingin menyampaikan apresiasi mendalam kepada BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat melalui Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP-nya, telah membuka mata kita semua, bagaimana Pemerintah Provinsi melakukan pengelolaan anggaran. Sesuai catatan BPK, masih banyak temuan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dimana sebagian juga merupakan temuan yang berulang yang disebabkan oleh karena kesalahan perencanaan dan kelemahan dalam pengawasan. Adanya temuan baru pada tahun

Dipindai dengan CamScanner

anggaran 2023 tentu akan menambah tumpukan temuan yang harus diselesaikan. **Fraksi Partai Gerindra meminta** Pemerintah Provinsi menyelesaikan semua temuan-temuan BPK tersebut, meskipun sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

2. Banyaknya temuan dan rekomendasi terkait adanya tindakan dalam indikasi penyalahgunaan kewenangan, yang menyebabkan potensi kerugian keuangan daerah, tentu sangat kami sesalkan. Fraksi Partai Gerindra sungguh menyayangkan temuan-temuan BPK itu, sekaligus mempertanyakan sejauhmana efektifitas fungsi pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah, termasuk juga DPRD. Kedepan, fungsi pengawasan dari DPRD mesti ada perubahan dan pembaharuan strategi ke arah yang lebih intensif.

3. Bagi Fraksi Partai Gerindra, kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2023 belum dilakukan secara maksimal, terutama dari sisi pendapatan. Capaian pendapatan daerah di tahun 2023 tidaklah memuaskan, karena terealisasi 96,72 persen atau Rp.6,263 Triliun dari jumlah Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 6,476 Triliun. Dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD), capaiannya juga relatif kecil dibanding target dan capaian tahun sebelumnya, dimana angka realisasi hanya 91,77 persen. Pajak daerah yang menjadi komponen pendukung PAD, capaiannya hanya 90,80 persen. Dan yang lebih parah lagi adalah komponen retribusi daerah dengan capaian hanya 70,73 persen saja. Kondisi ini tentu tidak bisa dipertahankan dan harus menjadi perhatian serius.

4. Pemprov perlu menggenjot lagi pendapatan dari komponen Pendapatan Lain-lain yang Sah. Sudah sejak lama kami di Fraksi Partai Gerindra mengingatkan banyak asset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tidak termanfaatkan dan terkelola dengan baik. Padahal, ini bisa menjadi sumber penerimaan. Sekarang kami ingatkan lagi akan pentingnya optimalisasi pengelolaan asset daerah. Terserah, mau dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Yang penting adalah bisa menambah peningkatan penerimaan daerah.

5. Terkait pendapatan transfer, Fraksi gerindra meminta pemprov untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat. Selama ini kita cenderung menerima apa adanya saja yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Padahal, menurut hemat kami di Fraksi Partai Gerindra, sesungguhnya urusan transfer daerah juga dipengaruhi oleh komunikasi yang baik antara daerah dengan pusat. Fraksi Gerindra meminta ini disikapi serius dengan menindaklanjuti ke kementrian, meskipun pada tahun anggaran 2023, target penerimaan dari pendapatan transfer yang ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun 2023 bisa direalisasikan 101.11 persen dari target.

Dipindai dengan CamScanner

6. Kami sudah berulangkali meminta agar persoalan yang melilit BUMD segera diselesaikan, dari urusan Balairung sampai kepada persoalan ATS yang sama-sama sudah kita ketahui. Hampir setiap pertemuan kita disini, persoalan tersebut dibahas, namun belum ada hasil sebagaimana yang diharapkan. Kami minta ini menjadi perioritas. Fraksi Partai Gerindra meminta ini dijadikan sebagai lembaran dan poin pertama yang harus dikebut Pemprov.

7. Fraksi Gerindra mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk lebih ketat lagi dalam mengawasi program yang dikerjakan masing-masing OPD. Rencana kerja harus mengacu pada anggaran yang sudah ada dan tepat sasaran. Penyerapan anggaran juga harus bisa maksimal, sehingga SILPA tidak besar, karena hingga penghujung Triwulan kedua tahun anggaran 2024 ini, kami mendapat informasi reaslisasi keuangan dan fisik kegiatan Pemprov Sumbar masih dibawa target. Bahkan, ada OPD yang realisasinya dibawah 15 persen.

8. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu sebesar Rp. 24,941 Miliar karena banyak kegiatan yang tidak bisa dijalankan, karena daftar kegiatan tidak terdapat dalam SIPD, disamping juga terdapat kelemahan manajemen kepemimpinan di OPD tersebut. Frasi Partai Gerindra meminta Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk mengusulan penyempurnaan Pergub dan memasukan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tidak masuk dalam SIPD yang merupakan usulan dan permintaan masyarakat agar semua kegaiatan pada dinas termasuk Pembangunan Jalan Usaha Tani dapat direalisasikan.

9. Fraksi Gerindra meminta Gubernur memerintahkan seluruh OPD agar benar-benar melaksanakan anggaran, apakah itu dari sumber APBN maupun dana APBD. Kesungguhan itu harus terlihat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hinga ke pelaporan. Sehingga realisasi anggaran bisa maksimal dan menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat.

10. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat harus menerapkan konsep *monitoring* (pengawasan berlanjut), *reporting* (pelaporan capaian kinerja SKPD) dan *verivable* atau dapat dibuktikan atas kinerja semua OPD. Konsep itu dilakukan per-triwulan untuk memudahkan pengawasan, apakah SKPD menjalani tahap demi tahap program yang telah disusunnya atau tidak, dan secara tidak langsung, melakukan deteksi dini terhadap penyimpangan target yang mungkin terjadi.

Dipindai dengan CamScanner

Saudara Pimpinan, Anggota, Hadirin, Yang Kami Hormati

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Dengan catatan yang kami sampaikan tadi dan sikap yang disampaikan Fraksi-fraksi menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan DPRD, maka Fraksi Partai Gerindra bisa menyepakati Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023 ini dijadikan Peraturan Daerah.

Demikian, Billahitaufik wal hidayah

Wassalamualaikum Wr.Wb

Salam Indonesia Raya!!!

FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua		Sekretaris
H. HIDAYAT, S.S, M.H	FRAKSI PARTAI GERINDRA GERAKAN INDONESIA RAYA DPRD PROV. SUMBAR	**NURKHALS DT.BIJO DIRAJO, S.Pt**

Penasihat:

Supardi

Anggota:

1. Desrio Putra
2. Evi Yandri Rajo Budiman
3. Ismunandi Syofyan, SE
4. Jasma Juni Dt.Gadang, SE
5. Jempol
6. Khairuddin Simanjuntak
7. Mario Syahjohan
8. Mesra
9. Mukhlis Yusuf Abit, ST,M.M
10. Drs.H.Syafruddin Putra Dt.Sungono, M.Si
11. Hj.Yunisra Syahiran, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD TAHUN 2023

Disampaikan pada Rapat ~~Paripurna~~ DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 Juli 2024 oleh juru bicara H.Gustami Hidayat,S.Pt,MP

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Yth: Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Yth: Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat
Yth: Saudara Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat
Yth: Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat
Yth: Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat
Yth: Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan, Kantor,Pimpinan BUMN dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik, LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat Allah *Azza wa Jalla Tuhan Yang Maha Esa*, kita memuji dan memujaNya karna telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat. *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, *Amin...*

Dipindai dengan CamScanner

Sebelumnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan terimakasih telah rampungnya pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Anggaran, TAPD dan OPD-OPD dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tentu kami berharap dalam pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 ini menjadi bahan evaluasi untuk penggunaan APBD tahun 2024.

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia

Bahwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 320 Ayat (1) yang berbunyi " Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir."

Pertanggungjawban pelaksanaan APBD merupakan siklus akhir dari pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban sekaligus merupakan sarana untuk evaluasi secara menyeluruh baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta hasil atau luaran (output) yang dicapai dari pelaksanaan anggaran. Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 kita melihat tidak hanya melihat bagaimana APBD ini dijalankan akan tetapi memastikan apakah program, kegiatan dan anggaran yang telah digunakan secara efisien, efektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat mewujudkan target kinerja program, kegiatan dan anggaran yang ditetapkan.

Dipindai dengan CamScanner

Dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan APBD 2023 ~~belum~~ PAD tidak memenuhi target hal ini disebabkan belum seriusnya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Berkenaan dengan belanja yang cukup tinggi, pemprov harus mengevaluasi mengenai belanja belanja yang tidak berhubungan dengan masyarakat. Hal ini perlu dicermati dan harus cerdas dalam penggunaan anggaran. jika dilihat lebih tinggi realisasi belanja dari pada realisasi Pendapatan, maka ini harus dilakukan penghematan.

Setelah membaca, membahas dan mendalami laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap Hasil Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2023, maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memiliki beberapa pandangan sebagai berikut:

1. Dari sisi pendapatan
   a. Berkaitan dengan tidak tercapai nya PAD dari target yang disepakati . Maka dari itu perlu adanya upaya-upaya peningkatan capaian PAD dari SKPD penghasil PAD seperti Bapenda. Salah satu bentuk upaya yang harus dilaksanakan oleh Bapenda adalah mengurangi alokasi anggaran yang ada pada kantor bapenda dan menambah alokasi anggaran yang lebih besar kepada samsat-samsat untuk melakukan upaya-upaya intensisfikasi pendapatan seperti meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak melalui sosialisasi, razia dan sebagainya. Selain itu untuk meningkatkan pendapatan pemprov juga diharapkan mengoptimalisasi penggunaan aset-aset milik pemprov untuk digunakan untuk berbagai kegiatan seperti rapat, pelatihan dan sebagainya.
   b. Untuk meningkatkan pembangunan di sumatera barat agar seluruh OPD berupaya mencari sumber-sumber pendanaan lain seperti DAK, hibah dan sebagainya.

Dipindai dengan CamScanner

c. Untuk meningkatkan pendapatan BLUD, diharapkan seluruh rumah sakit tidak hanya meningkatkan sarana dan prasarana, akan tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang 3S (senyum, sapa, salam) sehingga membuat pasien merasa nyaman dan hal ini akan mempengaruhi citra rumah sakit di masyarakat.

2. Dari sisi belanja:
   a. F.PKS berharap upaya dalam mengurangi defisit dalam APBD, agar pemerintah daerah berupaya untuk melakukan upaya-upaya penghematan terhadap belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti biaya habis pakai dan sebagainya.
   b. Untuk percepatan pelaksanaan kegiatan tahun 2024, diminta kepada Pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis, sehingga target-target yang telah disepakati bersama dalam APBD tahun 2024 bisa tercapai. Selain itu juga diharapkan kesalahan-kesalahan teknis seperti kesalahan dalam penganggaran baik spesifikasi, lokasi dan sebagainya agar diantisipasi oleh pemerintah daerah, sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.
   c. Agar SKPD bisa disiplin dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD, sehingga tidak menumpuk kegiatannya diakhir tahun.
3. Terhadap temuan-temuan dari Laporan hasil pemeriksaan BPK maupun APIP, agar pemerintah daerah melakukan langkah-langkah untuk penyelesaiannya baik administrasi maupun kerugian daerah. Dan diharapkan dalam jangka waktu 60 hari temuan tersebut sudah selesai sehingga tidak menjadi persoalan hukum dikemudian hari. Dan kiranya apabila ada promosi terhadap ASN salah satu syaratnya adalah bebas dari temuan.

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Hadirin yang berbahagia

Setelah mempelajari dengan seksama akhirnya kami Fraksi PKS berkesimpulan bahwa secara umum hasil pembahasan **Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023** diatas telah diselesaikan, besar harapan kami kiranya hasil keputusan ini nantinya dapat berjalan dengan baik dan sukses, sesuai harapan serta ada perbaikan dalam pelaksanaan APBD tahun selanjutnya. Untuk itu, dengan berserah diri kepada Allah SWT dan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahiim" Fraksi PKS menyatakan **menerima** Ranperda tentang Pertanggungjawban pelaksanaan APBD tahun 2023. Aqulu Qauli Hadza, Wastaqhfirullah Li Walakum Wa afwan mingkum *ASSALAMUALAIKUM, WR, WB.*

Padang, 1 Juli 2024 M
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS)
DPRD Provinsi Sumatera Barat

H.Gustami Hidayat,S.Pt,MP
Juru Bicara

Drs. H. Nurfirman Wansyah, MM, Apt
Ketua

Muhammad Ridwan, S.IP
Sekretaris

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Barat

H.Irsyad Syafar Lc,M.Ed	: Pembina
Drs.H.Nurfirman Wansyah	: Ketua
H.Mochlasin,S.Si	:Wakil Ketua
H.Muhammad Ridwan,S.Ip	: Sekretaris
H.Rahmat Saleh,S.Farm,M.IP	: Anggota
H.Gustami Hidayat,S.Pt.MP	:Anggota
H.Rafdinal,SH,MH	:Anggota
Budiman,S.Ag,MM	:Anggota
Drs.H.Asra Faber,MM	:Anggota
H.M.Ihpan	:Anggota

Dipindai dengan CamScanner

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN 2023

Disampaikan Dalam Rapat Pembahasan Akhir

Dalam Rangka

Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi

Senin , 1 Juli 2024

Dipindai dengan CamScanner

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yth. Gubernur Sumatera Barat

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Dilingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Rekan Rekan wartawan, undangan dan hadirin yang berbahagia

Pertama dan utama sekali marilah sama-sama panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, pada pagi hari ini kita kembali dapat hadir pada Rapat Kerja Pembahasan Akhir Dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap :

RANPERDA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2023.

Sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, junjungan umat dan dan suri tauladan bagi kita dengan Al Qur'an dan Hadist yang ditinggalkan sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankan kami **Fraksi Partai Demokrat**, menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan telah memberikan kesempatan untuk membacakan Pendapat Akhir Fraksi pada Rapat yang terhormat ini, dan juga ucapan terima kasih serta penghargaan yang tulus kami kepada Pimpinan dan Anggota dalam Pembahasan Ranperda Tersebut dan tentunya kepada Bapak Gubernur yang telah menyampaikan laporannya pada hari ini, semoga Allah akan memberikan Rahmat dan Hidayahnya Aamiin ... Aamiin Ya Rabbal Allamin.

Dipindai dengan CamScanner

Pertanggung jawaban pelaksanana APBD tahun 2023, pada dasarnya merupakan wujud kristalisasi aspirasi daerah, yang disusun dan diputuskan bersama antara kepala daerah dengan DPRD yang dilakukan secara transparan.

Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014, pada pasal 320 ayat (1) yang berbunyi, "Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berkahir."

Sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD merupakan akhir dari siklus agenda pengelolan keuangan daerah yang dimulai dari KUA PPAS, APBD, Perubahan APBD dan di akhiri dengan pertanggung jawabana peaksanaan APBD. Sebagai akhir dari siklus pengelolaan ke uangan daerah maka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD merupakan sarana untuk mengevaluasi dari keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan daerah serta untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan yang direncanakan telah dilakukan secara Efektif dan Efesien dalam rangka mewujudkan sasaran yang akan dicapai.

Pada kesempatan ini kami Fraksi Partai Demokrat dengan membaca Ranperda yang diberikan dan begitu juga buku laporan hasil pemeriksaan BPK - RI izinkan kami menyampaikan beberapa hal Sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1. Terkait penyerapan anggaran oleh organisasi perangkat daerah kita menekankan pentingnya memaksimalkan penggunaan anggaran untuk mencapai visi dan misi pemerintahan daerah, termasuk memulihkan ekonomi, penyedia layanan publik, pengurangan pengangguran dan pengurangan kemiskinan. Tentu harus ada rekomendasi khusus terkait pelaksanaan proyek peningkatan jalan dan menekakankan pentingnya data yang akurat serta perencanaan yang matang dalam proses perencanaaan fisik. Hal itu tentu juga harus didukung oleh pentingnya koordinasi dan singkronisasi perangkat daerah agar program-program yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat.

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan ketentuan pasal 6 ayat (2) peraturan Menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Dimana ruang lingkup pembahasan terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan APBD meliputi evaluasi legalitas, evaluasi konsistensi dan evaluasi kebijakan terhadap data yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA) laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca maupun beberapa lampiran lainya.

Dipindai dengan CamScanner

Terkait hal ini Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa pembahasan Laporan pertanggung jawaban APBD tentunya bukan hanya sebatas formalitas, tetapi sangat penting untuk menguji sejauh mana konsistensi pemerintahan daerah dalam melaksanakan perencanaan khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah, serta bagaimana konsistensi antara Data-data yang disajikan baik dalam laporan realiasasi anggaran (LRA) dengan posisi saldo serta neraca, maupun kesesuaian dengan perturan perundang- undangan yang berlaku atas legalitas.

3. Pada Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura tahun 2023 dapat kita lihat banyaknya kegiatan yang tidak terlaksana, ada 21 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 24.941.360.083., hal ini menandakan lemahnya pengawasan dari dinas tersebut dan kepala dinas yang tidak dapat memposisikan diri sebagai kepala dinas, hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja OPD tersebut dan juga berimbas pada realisasi dan penyerapan anggaran. Maka kiranya saudara Gubernur untuk dapat mengevaluasi pada dinas tersebut, agar hal ini bisa menjadi catatan dan perbaikan kinerja untuk tahun yang akan datang.

4. Seperti yang dapat kita lihat pada laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2023 yang telah dibahas beberapa waktu lalu. Kita melihat data pada dinas BMCKTR dari temuan dan rekomendasi yang ada terdapat anggaran sebesar Rp. 47.350.506.900,- di kegiatan ini adanya Pembangunan Fasilitas Pengering Jagung dan Gedung Pengelolaan Pakan. Kenapa kegiatan ini tidak berada pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura. Tetapi malah berada pada dinas BMCKTR yang pada dasarnya tidak masuk dalam RKPD, RENJA, dan KUA PPAS. Serta di RAPBD Kami Fraksi Partai Demokrat tidak ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

5. Pada Biro Kesejahteraan Rakyat dari data hibah Lembaga dari rumah ibadah ada anggaran Rp. 4.205.000.000 yang tidak terealisasi. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan provinsi akan persoalan ini, supaya ditahun 2024 ini tidak menjadi persoalan lagi.

Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, hadirin dan hadirat yang Kami Hormati ;

Demikianlah beberapa hal Pandangan, Catatan dan Saran serta Penegasan dari Pendapat Akhir **Fraksi Partai Demokrat** terhadap Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Apbd Tahun 2023.

Dengan mengucapkan ***"Bismillahirahmanirahim"*** pembahasan dalam rapat pembahasan akhir terhadap hasil pembahasan Ranperda di atas dapat dilanjutkan ketahapan selanjutnya dengan memperhatikan Pandangan, Catatan dan Saran serta Penegasan, yang kami bacakan diatas.

Terima Kasih,

Hormat kami,

Dipindai dengan CamScanner

Padang, 1 , Juli 2024

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua, Sekretaris,

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD PROV. SUMBAR

ALI TANJUNG **Hj. A I D A, SH**

Wabillahi Taufik Wall Hidayah,

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penasehat	: 1. H. Suwirpen Suib. S.Sos
Ketua	: 2. Ali Tanjung
Wakil Ketua	: 3. Suharjono. SE
Sekretaris	: 4. Hj. Aida. SH
Bendahara	: 5. Jefri Masrul. SE
Anggota	: 6. H. M. Nurnas, ST
	7. Ir.H.Arkadius.Dt. Intan Bano. MM. MBA
	8. H. Ismet Amzis. SH
	9 .H. Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa. MM

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

JL. KHATIB SULAIMAN NO. 67 TELP. (0751) 7057591 – 7057592 – 7057593 FAX (0751) 59328 PADANG 25133

RAPAT KINERJA

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAREAH TAHUN ANGGARAN 2023

SENIN, 01 JULI 2024
JURU BICARA : H. DASWANTO,SE

YTH. Saudara Gubernur dan Wail Gubernur Prov. Sumatera Barat

YTH. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumatera Barat

YTH. Saudara Pimpinan: Porkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Prov. Sumatera Barat saudara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat

YTH. Saudara Sekda,Staf Ahli,Asisten,Inspektur,kepala Bada,Kepala Dinas,Biro diLingkungan PEMDA Prov. Sumatera Barat

YTH. Sekwan beserta jajaran dan Tenaga Ahli DPRD Prov. Sumatera Barat

Dipindai dengan CamScanner

YTH. Saudara Pimpinan Lembaga, BUMN, BUMD, Perbankan, Partai Politik Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda Ninik Mamak, Alim Ulama,Cadiak Pandai,Ketua PKK, Ketua GOW, Ketua Dharma wanita,Bundo Kanduang Limpapeh Baanjuang di rumah nan Gadang,beserta tokoh masyarakat Sumatera Barat

YTH. Teman-teman Wartawan, baik media cetak maupun elektronik

Hadirin undangan yang berbahagia....

Alhamdulillahirabbil "alamiin,segala Puji bagi Allah Azza wa Jalla, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian,sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara Paripurna Penyampaian Pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatunhasanah kita Nabi Muhammad SAW, béserta Keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya,dan tentunya kita berharap semoga termasuk di dalamnya. Amiin..

Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pendapat Akhir fraksi PAN terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun anggaran 2023 ini.

Rapat Dewan Yang Berbahagia...

Sebelum kami menyampaikan pendapat akhir Tentang APBD Tahun Anggaran 2023,melalui kesempatan ini,Fraksi PAN mengucapkan banyak terimakasih kepada Yth. Saudara Gubernur atas penyampain ~~Nota~~ pandangan umum ~~Keuangan~~ RAPBD Sumatera Barat tahun 2023 yang telah disampaikan melaui rapat paripurna kemarin. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada TAPD yang telah merancang Ranperda APBD ini sedemikian rupa,sehingga pembahasan RAPBD tahun anggaran 2023 ini

Dipindai dengan CamScanner

data diproses dengan segera. Kita selalu berdoa tentunya,semua keja ini bisa bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat melaui perencanaan dan pelaksanaan APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Rapat Dewan Yang Berbahagia...

Prinsip-prinsip penyusunan APBD tahun anggran 2023 sebagaimana diatur dalam Permendagri No.84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2023,menegaskan kepada kita semua bahwa penyusunan APBD ini harus memiliki daya kualitas yang tidak saja dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis,tapi juga secara moral dan politik kapada masyarakat. Ketaatan waktu,ketaatan hüküm, dan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat haruslah menjadi bagian yang integral dalam proses penyusunan RAPBD tahun anggran 2023 ini.

Penyampaian pendapat akhir fraksi2 provinsi sumatera barat tahun anggaran 2023 sangat penting dań memiliki peran strategis dlm menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pembangunan sumatera barat,agar tetap berada dlm tracknya . Hal ini terkait dengan tahun 2023 adalah tahun terakhir dari pemerintahan kita baik Gubernur maupun DPRD dań juga di tahun 2023 adalah tahun politik dimana akan dilaksanakan pilkada di Sumatera Barat. Hal ini tentu akan menguras beberapa anggaran dalam tahapan pelaksanaan pilkada.

Rapat Dewan Yang Terhormat.....

Secara statistik, proses pembangunan Sumatera barat masih memperlihatkan pelambatan dań tahun 2023 merupakan tahun ke tiga dari pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026.

Dipindai dengan CamScanner

Realitas ini harus kita akui sebagai kelanjutan dari pola pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir yang juga masih bertumpu kepada sektor non agraris dan konsumtif,sehingga berpotensi memunculkan persoalan yang lebih besar. Dengan struktur dan konstruksi pertumbuhan ekonomi yang selama ini berjalan di Sumatera Barat memperlihatkan gejala dimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum mampu meningkatkan kesejahteraan sebagian besar masyarakat sehingga berpotensi meningkatnya inflasi di Sumatera barat.

Dengan demikian ,kebijakan pemulihan ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi struktur ekonomi dan potens ekonomi di Sumatera Barat yang diarahkan pada sektor pertanian.

Hal ini bertujuan agar visi dan misi Provinsi dalam mewujudkan penguatan ekonomi nagari,yang pada umumnya masyarakatnya hidup disektor pertanian benar-benar dapat direalisasikan . akan halnya perubahan yang mendasar terhadap kebijakan pembangunan Sumatera Barat untuk mengubah struktur pertumbuhan ekonomi yang masih timpang tersebut. Sehingga dengan itu diharapkan ada perubahan dan peningkatan yang cukup significant terhadap kontribusi pertumbuhan pada sektor pertanian yang hakikatnya salah satu primadona Sumatera Barat. karena fraksi PAN sangat mendorong agar kita lebih banyak memberi perhatian kepada sektor pertanian yang menjadi tambatan penghidupan sebagian besar penduduk Sumatera Barat.

Hadirin rapat Dewan yang berbahagia....

Melihat semakin meningkatnya kebutuhan anggaran,disisi lain makin sulitnya penambahan dana transfer daerah bahkan cenderung berkurang dan penggunaanya pun banyak yang sudah diarahkan,maka

Dipindai dengan CamScanner

perlu pemprov melakukan inovasi dań terobosan dałam meningkatkan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah tahun 2023 yang diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pendapatan transfer dan lain-lain,pendapatan asli daerah yang sah yang ditetapkan Rp 3,03 Triliyun,terealisasi hanya sebesar Rp 2,76 Triliyun (91,77%) yang terdiri dari Pajak Daerah Rp 2,46 triliyun,terealisasi sebesar 2,23 triliyun (90,80%),pendapatan retribusi Rp 22,69 Milyar,terealisasi Rp 15,04 Milyar (70,73%),pendapatan hasıl pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rencana Rp117,27 Milyar,terealisasi Rp 117,08 Milyar (99,84%)dan lain-lain PAD yang

sah Rp 431,15 Milyar,terealisasi Rp 414,91 milyar (96,24%0 semua yang direncanakan tidak satupun yang dapat tercapai dan melampaui yang ditargetkan,sepuluh tahun terakhir,tahun 2023 inilah baru terjadi.

Adapun upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain:

1. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya,baik pajak pribadi maupun pajak berbentuk badan.Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh wajib pajak yang belum daftar ulang dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dengan melakukan berbagai program sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dan manfaatnya bagi pembanguan daerah
2. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta

Dipindai dengan CamScanner

menyediakan layanan retribusi yang mudah diakses,cepat dan transparan bagi masyarakat.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah,seperti menyewakan aset daerah,membangun kerjasama dengan pihak swasta,dan menjual aset daerah yang tidak produktiv
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sarana prasarana retribusi daerah
5. Memperkuat kelembagaan pengelolaan PAD dengan cara meningkatkan sumber daya manusia pengelolaan PAD
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PAD secara berkala untuk mengetahui tingkat efektifitas pengelolaan PAD
7. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/kota maupun pihak Swasta dalam rangka optimalisasi pendapatan Daerah

Dari sisi pengalokasian belanja,dimana alokasi belanja modal yang disediakan pada perubahan APBD tahun 2023 atalha sebesar Rp 1.065.481.244.507 dengan realisasi sebesar Rp 991.975.692.930,52 atau 93,10%. Beberapa masalah belanja kami menyetujui rekomendasi dari banggar,diantaranya:

1) Meningkatkan alokasi anggaran belanja modal terutama belanja pemeliharaan jalan,jembatan dan irigasi secara terus menerus sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan mengurangi secara signifikan alokasi belanja perjalanan dinas,ATK, makan-minum dan belanja operacional lainnya.
2) Mengalokasikan anggaran yang mencukupi atau mencari sumber pembiayaan lainnya untuk menuntaskan proyek-proyek strategis

Dipindai dengan CamScanner

daerah yang belum tuntas,agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

3) Menyelesaikan proyek-proyek yang masih terbengkalai agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah.

4) Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan pengawasan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Basil pelaksanaan kegiatan.

Rapat Dewan Yang Terhormat....

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PAN atas Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Barat tentang pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2023.

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmaanirroohiim, kami Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan berserah diri kepada Allah SWT, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dareah Tahun Anggaran 2023 kami menyatakan SETUJU menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kami fraksi PAN mengucap terimakasih atas segala perhatian dan kerjasama semua pihak, dan atas segala kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga keputusan kita akan membawa berkah berlimpah bagi Sumatera Barat kini dan nanti.

billahitaufiq wal hidayah,ihdinash shirotol mustaqim

wassalamualaikum warrohmatullahi wabarakotuh

Dipindai dengan CamScanner

Padang, 01 Juli 2024

Fraksi PAN DPRD Sumatera Barat

Mahyatul, SE, MSi.	**Daswanto, SE**
Ketua	Sekretaris

H. INDRA DT RAJO LELO,SH,MM	: PENASEHAT FRAKSI
H. MAIGUS NASIR, S.Pd	: WAKIL KETUA FRAKSI
H.DASWANTO,SE	: SEKRETARIS FRAKSI
H. DODY DELVY,SE	: BENDAHARA FRAKSI
H. MUZLI M. NUR, S.Pd	: ANGGOTA FRAKSI
H. AHMAD RIUS,SH	: ANGGOTA FRAKSI
H. BUKHARI DT TUO, SE	: ANGGOTA FRAKSI
MUHAMMAD IKHBAL.SE	: ANGGOTA FRAKSI
Hj. ARTATI, SH.MH	: ANGGOTA FRAKSI

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 – 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPIVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGARAN 2023
DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA
SENIN, 1 JULI 2024

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang kami hormati :

Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan Kepala Biro dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran, rekan-rekan wartawan, undangan dan hadirin yang kami muliakan.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia Nya kepada kita semua sehingga dapat hadir pada kesempatan ini, untuk melaksanakan Rapat Kerja dalam rangka Penyampaian Pendapat akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Ranperda. Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 – 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini, aamiin Ya Rabbal Alamin.

Sdr. Gubernur, Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya kami menyampakan terima kasih kepada Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pendapat akhir Fraksi pada Rapat Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat diruangan rapat ini.

Terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai juru bicara untuk menyampaikan Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat. Semoga amanah yang diberikan kepada saya ini dapat saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sdr. Gubernur, Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati

Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dapat merampungkan hasil pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023.

Sebelum kami menyampaikan keputusan Fraksi Partai Golkar, izinkan kami menyampaikan pendapat dan saran terhadap hasil pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023, sebagai berikut :

A. **Terhadap Pendapatan Daerah**

Terhadap realisasi pendapatan daerah, Fraksi Partai Golkar melihatnya pada tahun 2023 kinerja keuangan khususnya dibidang pendapatan daerah bila dibandingkan dengan tahun 2022 adalah menurun secara persentase. Realisasi Pendapatan Daerah baru terealisasi sebesar 96,72 % . Kalau kita lihat lebih rinci dapat kita lihat sebagai sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Daerah pada tahun 2023 boleh dikatakan memprihatinkan karena tercapai hanya sebesar 91,77 % dari target Rp.3.034.554.065.207,-. Fraksi Partai Gokar berpendapat ini disebabkan oleh belum optimalnya penggarapan PAD tersebut, untuk itu kedepannya perlu dicarikan strategi yang jitu dalam penggarapan PAD tersebut, jangan strateginya bersifat monoton setiap tahunnya.

Dipindai dengan CamScanner

2. Terhadap Realisasi Pendapatan Transfer walaupun melebihi dari target, yaitu sebesar 101,11 % dari target Rp.3.464.761.720.139,-, Fraksi Partai Golkar berpendapat angka ini masih bisa dioptimalkan lagi dengan menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga (KL) di Pusat dengan cara mendorong SKPD untuk mengajukan proposal ke kementerian dan lembaga (KL). Penjemputan dana ke Pusat melalui proposal ini bagi daerah lain cukup banyak dilakukan, sehingga penerimaan terhadap pendapatan transfer yang mereka terima juga cukup besar.

3. Terhadap realisasi Lain-Lain pendapatan daerah yag sah, Fraksi Partai Golkar berpendapat masih punya peluang juga untuk ditingkatkan karena untuk pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga yang berasal dari (BUMN dan Perusahaan besar swasta) yang berada di Provinsi Sumatera Barat masih potensial untuk ditingkatkan sumbangan pihak ketiganya.

B. Terhadap Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah pada tahun 2023 hanya sebesar 94,18 % dari target Rp.6.745.614.683.086,-. Dari kondisi realisasi belanja daerah ini kalau kita cermati SKPD yang rendah realisasinya tidak jauh berbeda setiap tahunnya. Terhadap hal ini Fraksi Partai Golkar melihatnya tidak ada keseriusan dari TAPD untuk mengevaluasi secara holistik terhadap SKPD yang setiap tahunnya selalu menjadi penyumbang SILPA terbesar. Dan dari jawaban TAPD terhadap SKPD penyumbang SILPA terbesar setiap tahunnya hampir juga tidak jauh berbeda, boleh dikatakan jawaban tersebut sudah klasik.

C. Terhadap Belanja Modal

Kalau kita cermatai alokasi belanja modal pada tahun 2023 baru sekitar 15 % dari total belanja daerah, sedangkan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan sebesar 40 %, jadi masih jauh lagi yang harus dicapai. Berdasarkan kondisi tersebut, Fraksi Partai Golkar mendorong pihak TAPD kedepannya dalam penyusunan anggaran harus punya keberanian untuk menggeser belanja perjalanan dinas, ATK, makan minum, dan belanja lain yang tidak terlalu urgen berpengaruh kepada kinerja untuk digeser ke belanja modal, kalau tidak posisi belanja modal tersebut akan berkisar sekitar 15 % tersebut setiap tahunnya.

D. Neraca

Terhadap Neraca ini, Fraksi Partai Golkar mengingatkan kepada Sdr. Gubernur untuk menyikapi terhadap lonjakan Piutang Daerah baik yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Piutang daerah ini

Dipindai dengan CamScanner

seharusnya menjadi sumber PAD untuk tahun depannya, tetapi kenyataannya piutang daerah ini masih belum perioritas bagi SKPD pemungut.

E. **Terhadap Indikator kinerja daerah maupun indikator kinerja program/kegiatan** pada masing-masing SKPD hendaknya menjadi perhatian yang serius oleh TAPD ketika melakukan pembahasan RKA SKPD. Karena ketika pra-pembahasan anggaran oleh komisi-komisi DPRD untuk indikator kinerja program/kegiatan yang tertuang dalam RKA masih ditemukan SKPD yang belum memahami indikator kinerja program/kegiatan, apalagi kalau disandingkan dengan RKPD dan RPJMD.

F. Pada kesempatan ini izinkan juga kami dari Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan beberapa hal yang sangat krusial saat ini kepada Sdr. Gubernur.

Bahwa pemerintah daerah itu hendaknya betul-betul hadir ditengah -tengah masyarakat ketika masyarakat sangat membutuhkan bantuan Pemerintah Daerah, jangan hanya sekedar mengeluarkan surat edaran, tetapi tidak dievaluasi apakah surat edaran itu jalan atau tidak dilapangan.
Yang kami maksudkan disini adalah kondisi kekinian terhadap jalan Padang – Bukittinggi via malalak dan jalan Padang – Solok via sitinjau lauik. Tingkat kemacetan sangat tinggi sekali yang disebabkan oleh padatnya arus lalu lintas. Kami melihat pihak Pemerintah Daerah cq. Dinas Perhubungan tidak optimal untuk mengatur lalu lintas pada dua jalur tersebut. Dalam kondisi seperti ini hendaknya pihak pemerintah daerah menurunkan petugas gabungan setiap harinya ke lokasi untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas. Jangan seperti yang sekarang ini setelah macet baru datang petugas ke lokasi untuk mengurai kemacetan.
Disisi lain kami dari Fraksi Partai Golkar juga melihat belum adanya kepedulian dari pihak Pemerintah Daerah terhadap maraknya isu judi online. Sementara judi online ini sudah merambah ke legislatif, yudikatif dan berkemungkinan juga sudah masuk ke eksekutif. Untuk itu kami dari Fraksi Partai Golkar mendorong Sdr. Gubernur agar melakukan pakta integritas dengan seluruh ASN dilingkungan Provinsi Sumatera Barat agar tidak terlibat dengan judi online tersebut. Sebab kalau ASN sudah terlibat nantinya juga akan berdampak kepada APBD, dimana akan terjadi SPJ fiktif dan mark up harga guna mencarikan dana untuk permanan judi online tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 – 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

Sdr. Gubernur, Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Akhir kata kami dari Fraksi Partai Golkar dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim " dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi **Peraturan Daerah**, dengan catatan semua yang telah disepakati dalam pembahasan oleh Banggar DPRD bersama TAPD dan penyampaian pendapat akhir fraksi hendaknya dilampirkan sebagai bahan dalam penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023.

Demikianlah Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan nantinya.

Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wabillahi Taufik Walhidayah

Assalamualaikum ww

Padang, 1 Juli 2024

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat

Ketua	**Sekretaris**
(Zulkenedi Said, S.Sos, S.H., M.Si., M.M., M.H.,M.AP)	**(Dr.H.Hardinalis Kobal, S.E.,M.M)**

Juru Bicara

(.....)

1. H.Afrizal, S.H., M.H (Wakil Ketua)
2. Zarfi Deson, S.H (Bendahara)
3. Ir. H. Hendra Irwan Rahim, M.M (Anggota)
4. Drh. Nela Abdika Zamri, M.M., M.Si (Anggota)
5. Dra. Hj. Siti Izzati Aziz (Anggota)
6. H. Lazuardi Erman, S.H (Anggota)

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PPP – NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 – 7057592 – 7057593 Fax (0751) 59328 Padang 25133

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Pendapat Akhir
Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023

Disampaikan pada Rapat Kerja Pembahasan Akhir
Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Senin, 01 Juli 2024

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yth. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Yth. Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Yth. Kepala OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat
Yth. Seluruh hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah Hirabbil'alamin wassalatu wassala mu'ala asrafilambia iwal mursalin wa'ala alihi waashabihi rasulillahi ajmain, ashadualla illahaillallah waashaduanna Muhammadan Abduhu Warasulluh laanabiaba'da Allahuma Sali'ala sayidina Muhammad Wa 'ala ali sayidina Muhammad.

Puji Syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir hari ini.

Dipindai dengan CamScanner

Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derjat manusia menjadi insan mulia dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Pembahasan Akhir Antara DPRD Sumbar dengan Pemerintah Daerah di ruang yang terhormat ini.

Dan secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Fraksi PPP-NasDem yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai juru bicara, untuk menyampaikan Pendapat akhir Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Fraksi PPP-NasDem memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Anggota Badan Anggaran Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama dengan OPD terkait yang telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah diatas, semoga kerja keras tersebut akan menjadi amal shaleh serta memberikan kemaslahatan bagi kemajuan masyarakat Sumatera Barat.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Dalam rangka pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahaan dan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 320 (ayat 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Ranperda tentang

Dipindai dengan CamScanner

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 03 Juni 2024 untuk selanjutnya dapat dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 ini merupakan sebuah bentuk aplikasi sistem pertanggungjawaban anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selain sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap target serta pencapaian kinerja program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama 1(satu) Tahun Anggaran.

Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang disampaikan tersebut, telah sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Dengan demikian besaran realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah termasuk SILPA yang terdapat dalam Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 telah sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK-RI.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh DPRD, paling lama satu (1) bulan terhitung sejak Ranperda tersebut disampaikan kepada DPRD. Mengacu kepada ketentuan tersebut, maka penetapan persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat harus segera ditetapkan.

Dipindai dengan CamScanner

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Mencermati proses lahir dan berakhirnya pelaksanaan APBD Tahun 202 kami merasa perlu memberikan masukan dan saran tindak lanjut ke depan, dala kita melahirkan APBD tahun-tahun berikutnya sebagai berikut :

1. Melihat pada capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Tahu 2023 tersebut, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa kiner pengelolaan keuangan daerah belum maksimal, baik pada aspek pendapata maupun belanja daerah. Pada aspek pendapatan daerah, penerimaan dari PA yang merupakan kinerja utama pendapatan realisasi hanya sebesar 91.77 % lebih rendah dari Tahun 2022. Ini merupakan kondisi yang kontradik dimana objek pajak bertambah dan pertumbuhan ekonomi meningkat, tetap penerimaan berkurang. Fraksi PPP-NasDem berharap hal ini tidak terjadi lag pada tahun-tahun berikutnya.
2. Demikian juga halnya dengan belanja. Pada satu sisi, terdapat kekurangai target pendapatan daerah cukup besar yaitu sebesar Rp. 212.456.553.419,- tetapi pada sisi lain sisa belanja juga cukup besar yaitu sebesar Rp 392.623.329.587,-. Terdapat kecenderungan menahan belanja. Semestiny apabila target pendapatan tidak tercapai, tentu sisa belanja semakin sedikit Kondisi ini menunjukan cukup banyak kegiatan-kegiatan yang sengaja tidak dilaksanakan agar tidak terjadi gagal bayar.
3. DPRD selain sebagai lembaga legislatif, juga memiliki fungsi Pengawasan, untuk itu kami berharap agar pemerintah bisa memberikan Laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran secara berkala setiap triwulan. Dengan demikian, kami (DPRD) bisa melaksanakan fungsi pengawasan secara lebih optimal sesuai Tupoksi DPRD.
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap OPD atau Dinas yang tidak bisa merealisasikan anggaran diatas 95 persen, karena berpotensi mengganggu kinerja pemerintah daerah. Proses evaluasi bisa dilakukan dengan menerapkan merit sistem,

Dipindai dengan CamScanner

dimana penempatan seseorang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.

5. Beberapa bangunan gedung milik pemerintah daerah Sumatera Barat yang dikerjakan pada tahun 2023, baik berupa pekerjaan baru maupun lanjutan, terkesan ada pekerjaan yang dianggarkan tapi belum melalui proses perencanaan yang matang. Sekarang tentu tidak waktunya lagi untuk kita berpolemik. Akibatnya dalam penganggaran dan pengerjaannya tidak maksimal, berupa tidak siapnya gedung sehingga belum berfungsi sesuai dengan kebutuhan, peruntukannya yang masih belum jelas dan lain sebagainya. Ke depan kami sangat berharap kepada Gubernur, supaya dari awal perencanaan, penganggaran sampai kepada proses pengerjaan bangunan tersebut, benar-benar dibahas dan disepakati bersama, berdasarkan kebutuhan Sumatera Barat dan tidak berdasarkan keinginan. Kondisi itu bertentangan dengan UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung.
6. Fraksi PPP-NasDem meminta kepada Gubernur agar membuat papan pengumuman terkait dengan OPD yang mempunyai prestasi dan yang tidak mempunyai prestasi di tempat-tempat umum dan keramaian seperti Mall, swalayan dan lain sebagainya agar memberikan motivasi dan efek jera kepada OPD-OPD yang belum mencapai target kinerjanya agar lebih memaksimalkan kinerjanya dan bisa meraih prestasi.
7. SILPA anggaran pada tahun 2023 mencapai angka 180 Milyar lebih dan ini merupakan SILPA yang besar, yang berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, untuk itu Fraksi PPP-NasDem menyarankan agar pada tahun-tahun yang akan datang pemerintah harus benar-benar serius dalam merencanakn dan merealisasikan anggaran yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi lagi SILPA yang begitu besar.
8. Khusus mengenai tindak lanjut Temuan BPK RI, hendaknya Gubernur benar-benar menindak lanjutinya dengan prosedur yang sudah ada, sehingga daerah

Dipindai dengan CamScanner

dan masyarakat tidak dirugikan oleh oknum yang mungkin ingin memperkaya diri dan keluarga atau kroni-kroninya.

9. Banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan dengan baik dan benar hal ini dapat dilihat dari aset yang sudah memiliki sertifikat namun objeknya tidak jelas dan begitu sebaliknya objeknya ada sertifikatnya belum ada, untuk itu Fraksi PPP-NasDem menyarankan agar aset-aset provinsi yang sudah dimanfaatkan oleh Kabupaten/Kota sebaiknya diserahkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari pada aset tidak terurus dengan baik dan benar.
10. Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang sangat strategis dan berkaitan langsung dengan program proritas pembangunan daerah, untuk itu Fraksi PPP-NasDem menegaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pemerataan peningkatan kualitas pendidikan baik itu diperkotaan maupun diperdesaan, dan kami meminta kepada saudara Gubernur khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan perhatian yang lebih besar dan sungguh-sungguh bagi kemajuan pendidikan di Sumatera Barat di masa yang akan datang.
11. Fraksi PPP-NasDem menegaskan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperhatikan dan memahami serta menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan pertanggugjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

Dipindai dengan CamScanner

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi PPP-NasDem dengan ini **menerima** Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Dijadikan sebagai sebuah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah Pendapat Akhir dari Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Pembahasan Akhir Antara DPRD Sumbar dengan Pemerintah Daerah, jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf dan kepada Allah jua kita mohon ampun.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

وَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 01 Juli 2024

Sawal, SH
Juru Bicara

Fraksi PPP-NasDem
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PPP - NASDEM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Sawal, SH	**Irwan Afriadi**
Ketua	Sekretaris

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No.87 Telp. (0751)443391, 7059325, 7059328 Fax.(0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
http: www.dprd-sumbarprov.go.id

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN DAN PKB DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2023

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Merdeka!!!

- **Yang Terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat**
- **Yang Terhormat Saudara Ketua dan Anggota Banggar dan Yang Terhormat Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat Beserta Jajaran**
- **Yang Terhormat Sekretaris Dewan Beserta Jajaran**

Terimakasih kepada Pimpinan Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan dan PKB untuk menyampaikan pandangan akhirnya.

Seizin Pimpinan Rapat Kerja ini kami mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan seizin-Nya kita dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat pagi ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Selanjutnya Shalawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kearwah nabi besar kita, Muhammad SAW junjungan alam pembawa perubahan, yang telah membawa kita dari alam kegelapan

Dipindai dengan CamScanner

menuju sinar kemajuaan-minazzulumati ilannur sebagaimana yang kita rasakan hari ini, serta selalu kita dambakan safaatnya.

Hadirin yang kami muliakan

Ucapan terikasih Fraksi kami sampaikan kepada Badan Anggaran yang telah berusaha dengan maksimal untuk menyelesaikan pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, dengan hasil yang berupa Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap Hasil Pembahasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 yang akan menjadi bahan bagi Fraksi kami dalam menyusun pendapat akhir ini sebagai berikut:

1. Tentang Gambaran Umum Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB sependapat dengan Banggar atas realisasi pendapatan daerah maupun belanja daerah untuk tahun 2023 belum sepenuhnya dapat mewujudkan sasaran dan target dari beberapa program strategis daerah, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah belum maksimal, baik pada aspek pendapatan maupun belanja daerah untuk itu Fraksi kami meminta kedepan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat betul-betul dapat melaksana program strategis tersebut dengan baik.

2. Terkait pada aspek efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sebagaimana terlihat dari LHP BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dan LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, juga belum begitu baik dengan ada 29 temuan dan 113 rekomendasi dengan kerugian daerah sebesar Rp. 5.491.349.321.79,- dan bahkan temuan tersebut sebagian merupakan temuan yang berulang yang disebabkan oleh **karena kesalahan perencanaan dan kelemahan dalam pengawasan** sebagaiman laporan dari Banggar, dapat kami sampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan dan PKB terhadap persoalan ini sudah sering/berulang kali mengingatkan Pemerintah Daerah Provinsi Suamtera Barat disetiap pembahasan Anggaran agar dalam membuat perencana tidak mempergunakan metode copypaste saja karena setiap tahun akan berbeda pencapaian target. Kedepan Fraksi

Dipindai dengan CamScanner

kami meminta Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya dan memfungsikan dengan maksimal pengawasan.

3. Tentang Pendapat Daerah khusus pada pos realisasi retribusi daerah sebesar Rp. 16.049.240.433 hanya 70.73% dan merupakan capaian terendah dari 5 (lima) tahun terakhir yang belum memberikan masukan maksimal pada PAD, Fraksi kami setuju dengan Banggar bahwa persoalan ini bisa terjadi disebabkan tidak optimalnya kinerja OPD-OPD terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah, kurangnya inovasi dan kreativitas kedepan Pemerintah Daerah Sumatera Barat harus dapat melakukan pembenahan terhadap OPD-OPD yang terkait

4. Terhadap Belanja Daerah, sebagaimana dalam laporan Banggar diantaranya alokasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 240.783.824.000,- , Belanja ATK sebesar Rp. 5.986.163.543,-, Belanja Cetak sebesar Rp.21.383.388.025,-, Belanja Bahan/Alat Kantor sebesar Rp. 29.953.170.764,- Belanja Makan Minum sebesar Rp. 88.935.730.826,- Belanja Jasa Iklan, Reklame, Film dan Pemotretan sebesar Rp. 10.590.079.432,-, Belanja Sewa Hotel sebesar Rp. 44.654.129.759,- dan Belanja Bimtek sebesar Rp. 22.578.126.005,- menunjukan ketidak efisienan dan ketidak efektifan alokasi anggaran, Fraksi kami sependapat dengan Banggar bahwa kedepan harus dihitung secara cermat dan akurat sehingga tidak terjadi pemubaziran anggaran

5. Fraksi kami mendukung kalimat yang disampaikan oleh Badan Anggaran bahwa *Pos belanja pegawai jangan lagi digunakan sebagai tempat cadangan anggaran*, pada hal sisa anggaran ini dapat digunakan untuk menggerakan program dan kegiatan disektor perekonomian masyarakat.

6. Dalam laporan Banggar menyebutkan *sampai tahun ke 4 masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, masih banyak proyek-proyek strategis daerah yang belum tuntas pembangunan diantaranya stadium utama, gedung budaya, jalan Pantai Padang menuju bandara BIM dan proyek lainnya*, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB memberikan pendapat bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah harus menyadarinya dengan penuh tanggunjawab dan melakukan evaluasi secara menyeluruh dari proses awal menetapkan suatu program, anggaran relalisasi serta auotputnya, sehingga kita tidak berkutat terus seperti dalam kasus ini disetiap tahunnya, terutama angka penyerapan dimana outputnya tidak berdampak terhadap Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini

Dipindai dengan CamScanner

7. Terhadap OPD yang dalam pelaksanaan program relisasi anggarnya masih rendah dibeberapa Dinas, Fraksi kami setuju dengan Banggar perlu diberikan funishment termasuk dalam hal dimana OPD yang dalam pelaksanaan programnya oleh BPK menemukan adanya penyelewengan agar segera menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Terhadap sisa anggaran yang cukup besar pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu sebesar Rp. 24.941.360.083,-. yang disebabkan karena banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dijalankan dengan segala persoalan yang ada, Fraksi kami sependapat dengan Banggar bahwa agar Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk mengusulan penyempurnaan Pergub dengan memasukan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tidak masuk dalam SIPD yang merupakan usulan dan permintaan masyarakat supaya semua kegiatan pada dinas ini dapat direalisasikan.

9. Mengenai OPD-OPD yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diembakan kepadanya, sesuai dengan evaluasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam laporan Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyampaikan ***bahwa eksistensi perangkat daerah belum sepenuhnya mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik, meskipun secara legalistik pembentukannya telah sesuai regulasi. namun dalam kenyataannya, mereka sering hanya menciptakan beban anggaran, dimana Keuangan daerah lebih banyak tersedot untuk biaya operasional dan belanja pegawai daripada pelaksanaan urusan pelayanan publik. Sebagai Implikasinya, perangkat daerah tersebut tidak banyak memberikan kontribusi bagi kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat,*** sekaitan dengan hal ini bagi Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menjadi catatan penting karena hasil evaluasi ini harus dilaksanakan dengan penuhtanggungjawab sehingga kedepan dalam rangka penyusunan APBD tidak lagi memberi ruang untuk OPD-OPD tersebut menjadi beban belanja daerah.

10. Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan bahwa pemerataan pembangunan/perhatian propinsi terhadap kab/kota yang masih masuk kategori miskin tingkat taraf hidup rakyatnya terasa belum diperhatikan. Dapat kami sampaikan bahwa bentuk ketidak perhatian Pemerintah Propinsi Sumatera Barat adalah terlihat tidak responnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengantipasi dari berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pusat Daerah diantaranya tentang Belanja Bagi Hasil Propinsi ke Kabupaten/Kota

Dipindai dengan CamScanner

sehingga ada 1 (satu) Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat ini yang akan tidak dapat pembagian terhadap pajak kendaraan bermotor.

Hadirin peserta Rapat yang kami hormati.

Dari hal-hal yang telah Fraksi kami uraikan di atas, serta mencermati tahapan-tahapan pembicaraan termasuk yang saat ini sedang berlangsung Rapat Kerja Pembahasan Akhir terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pengunaan APBD Tahun 2023, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB dapat ***menerima dan menyetujui*** Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 menjadi Peraturan Daerah, semoga masukan Fraksi PDI Perjuangan dan PKB di atas dapat menjadi masukan untuk pelaksanaan berikutnya.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dan PKB yang dapat kami sampaikan, akhirnya kami ucapkan terimaksih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 01 Juli 2024

PIMPINAN FRAKSI
PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Albert Hendra Lukman,SE	**Firdaus, S.H.I**
Ketua	Sekretaris

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 321 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan

Dipindai dengan CamScanner

Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;

Dipindai dengan CamScanner

d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas:
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp	6.263.878.436.851,68
b.	Belanja.....	Rp	6.352.991.353.499,87
	Surplus/defisit.....	(Rp	89.112.916.648,19)
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan.....	Rp	289.560.461.073,38
	- Pengeluaran.....	Rp	20.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto..	Rp	269.560.461.073,38
d.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	180.447.544.425,19

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.212.456.553.355,32) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	6.476.334.990.207,00
2.	Realisasi	Rp	6.263.878.436.851,68
	Selisih	(Rp	212.456.553.355,32)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.392.623.329.586,13 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Anggaran belanja setelah Perubahan	Rp	6.745.614.683.086,00
2.	Realisasi	Rp	6.352.991.353.499,87
	Selisih	Rp	392.623.329.586,13

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.180.166.776.230,81 dengan

Dipindai dengan CamScanner

rincian sebagai berikut:

1. Surplus/defisit setelah Perubahan	(Rp	269.279.692.879,00)
2. Realisasi	(Rp	89.112.916.648,19)
Selisih	Rp	180.166.776.230,81

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.280.768.194,38 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	289.279.692.879,00
2. Realisasi	Rp	289.560.461.073,38
Selisih	Rp	280.768.194,38

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp	20.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp	20.000.000.000,00
Selisih	Rp	0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.280.768.194,38 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp	269.279.692.879,00
2. Realisasi	Rp	269.560.461.073,38
Selisih	Rp.	280.768.194,38

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	289.279.692.879,38
b.	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Berjalan	(Rp	289.560.461.073,38)
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	180.447.544.425,19

Dipindai dengan CamScanner

d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	322.477.368,00
e.	Lain-lain	(Rp.	41.709.174,00)
f.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	180.447.544.425,19

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.	Jumlah aset	Rp	12.191.738.756.207,30
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	493.355.576.175,90
c.	Jumlah ekuitas	Rp	11.698.383.180.031,40

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.	Pendapatan-LO	Rp	6.455.678.341.331,62
b.	Beban	Rp	6.149.856.490.235,09
d.	Surplus/Defisit Operasional	Rp	305.821.851.096,53
e.	Surplus/Defisit Non Operasional	(Rp.	4.742.756.477,12)
f.	Pos Luar Biasa	Rp.	0,00
g.	Surplus/Defisit LO	Rp.	301.079.094.619,41

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.	Saldo awal kas daerah per 1 Januari 2023	Rp	289.279.692.879,38
b.	Arus Kas dari aktifitas operasi	Rp	901.515.422.955,33
c.	Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp	1.010.628.339.603,52)
d.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	280.768.194,00
e.	Saldo kas daerah akhir per 31 Desember 2023	Rp.	180.447.544.425,19

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp	11.505.410.775.094,10
b.	Surplus/Defisit LO	Rp.	301.079.094.619,41
c.	Koreksi Ekuitas	(Rp.	108.106.689.682,09)
d.	Ekuitas Akhir	Rp.	11.698.383.180.031,40

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2023 memuat informasi secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023;

Lampiran I.2 Ringkasan APBD Yang Diklasikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;

Lampiran I.3 Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;

Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023;

b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023;

c. Lampiran III Laporan Operasional Per 31 Desember 2023;

d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2023;

e. Lampiran V Neraca Per 31 Desember 2023;

f. Lampiran VI Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2023;

g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan (Pada Buku Lap. Keuangan);

h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Tahun Anggaran 2023;

i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun Anggaran 2023;

j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihannya Tahun Anggaran 2023;

k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;

Dipindai dengan CamScanner

l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2023;

m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2023;

n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023;

o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2023;

p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2023;

q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2023;

r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2023;

s. Lampiran XIX Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

t. Lampiran XX-1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Tahun 2023;

u. Lampiran XX-2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Rugi Labaa) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Tahun 2023;

v. Lampiran XXI Daftar Obligasi/Pinjaman Daerah Daerah Tahun Anggaran 2023;

w. Lampiran XXII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 September 2024
Plt. GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

AUDY JOINALDY

Diundangkan di Padang
pada tanggal 27 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

HANSASTRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR : 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 : (2-237/2024)

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Darah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.1/7796/Keuda, tanggal 30 April 2024 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan dasar pertimbangan di atas maka Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah terlebih dahulu diaudit oleh BPK RI dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan.

Secara umum PERDA ini memuat materi-materi pokok yang ada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) beserta lampiran sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda, tanggal 30 April 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 218

Dipindai dengan CamScanner